

**UPAYA NEGOSIASI PEMERINTAH TANZANIA DAN ACACIA MINING
TERKAIT REFORMASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN ERA**

PRESIDEN JOHN MAGUFULI

SKRIPSI



Oleh:

VANIA GITTA ADIANANTO

19323181

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**UPAYA NEGOSIASI PEMERINTAH TANZANIA DAN ACACIA MINING
TERKAIT REFORMASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN ERA**

PRESIDEN JOHN MAGUFULI

PROPOSAL SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

VANIA GITTA ADIANANTO

19323181

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Upaya Negosiasi Pemerintah Tanzania dan Acacia Mining terkait Reformasi Kebijakan Pertambangan Era Presiden John Magufuli
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

30 Maret 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.Int.Rel.
- 2 Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 3 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

06 Maret 2023,



Vania Gitta Adiananto



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	13
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	14
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	14
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	15
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
2.1. Dinamika Hubungan Pemerintah Tanzania dan Acacia Mining	17
2.1.1 <i>Perlakuan Negatif Perusahaan terhadap Masyarakat dan Pemerintah</i>	18
2.1.2 <i>Pengungkapan Pemerintah Tanzania terhadap Kasus Acacia Mining</i>	22
2.2. Tahapan dan Implementasi Reformasi Kebijakan Pertambangan	25
2.2.1 <i>Sektor Pertambangan Tanzania Era Pra Reformasi Kebijakan</i>	26
2.2.2 <i>Proses Reformasi Kebijakan Pertambangan Tanzania</i>	29
2.3 Respon Acacia Mining terhadap Reformasi Kebijakan	33
BAB III.....	39
3.1. Bargaining Power Tanzania	39

3.1.1 Sumber Daya Ekonomi.....	39
3.1.2 Kebutuhan Pembangunan Negara terhadap Investor Asing	42
3.1.3 Otoritas Berdaulat	46
3.2. Bargaining Power Acacia Mining	48
3.2.1 Sumber Daya Ekonomi.....	48
3.2.2 Motivasi Perusahaan	51
3.2.3 Bantuan Hukum atau Intervensi Diplomatik	52
BAB IV	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Rekomendasi.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Cadangan Emas Perusahaan Tambang di Tanzania..... 18



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Nilai Ekspor Emas Tanzania Tahun 2019-2021	26
Grafik 2. Saham Acacia Mining Sejak Larangan Ekspor Berlaku.....	35
Grafik 3. Negara Tujuan Ekspor Emas Tanzania Tahun 2019	42



DAFTAR SINGKATAN

ASM	: Artisanal and Small-Scale Mining
BIT	: Bilateral Investment Treaty
BRELA	: Business Registration and Licensing Agency
CCM	: Chama Cha Mapinduzi
CSR	: Corporate Social Responsibility
EPO	: Environmental Protection Order
EY	: Ernst and Young
FDI	: Foreign Direct Investment
HAM	: Hak Asasi Manusia
LIC	: Low Income Country
LMIC	: Low Middle Income Country
LSM	: Large-Scale Mining
MNC	: Multinational Corporation
NEMC	: National Environmental Management Council
NDC	: National Development Corporation
NMGM	: North Mara Gold Mine
PDB	: Produk Domestik Bruto
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
RAID	: Rights and Accountability in Development
STAMICO	: State Mining Corporation
TEIA	: Tanzania Extractive Industries Act
TZS	: Tanzanian Shilling
USD	: United States Dollar

ABSTRAK

Eksistensi perusahaan multinasional Acacia Mining dalam sektor pertambangan di Tanzania telah membawa dampak negatif bagi negara dan masyarakat lokal. Pemerintahan yang dipimpin Presiden John Magufuli mengambil tindakan tegas untuk perusahaan tersebut dengan melakukan amandemen atau reformasi kebijakan sektor pertambangan di Tanzania pada tahun 2017, sebagai respon atas konflik yang terjadi dan implementasi strategi politik yang dijalankannya. Larangan ekspor emas dan konsentrat tembaga serta pengenaan denda kepada Acacia Mining tentunya menimbulkan kerugian bagi operasional perusahaan. Negosiasi ulang terkait kontrak perjanjian ditawarkan oleh pemerintah kepada perusahaan dengan syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya negosiasi yang dijalankan pemerintah Tanzania dan perusahaan Acacia Mining untuk mencapai kesepakatan, selama periode tahun 2017-2020. Analisis ini berdasar pada teori *Bargaining Power* oleh Frederick Abbott, dimana terdapat tiga faktor dari masing-masing aktor (negara tuan rumah dan investor asing) yang dapat mempengaruhi posisi tawar menawarnya dalam proses negosiasi.

Kata Kunci: Presiden John Magufuli, Acacia Mining, Reformasi Kebijakan Pertambangan, Negosiasi, *Bargaining Power*

ABSTRACT

The existence of the multinational company Acacia Mining in Tanzania mining sector has had a negative impact on the country and local communities. The government led by President John Magufuli took decisive action for the company through amendment or policy reforms for the mining sector in Tanzania in 2017, as response to the conflicts and the implementation of its political strategy. The export ban of gold and copper concentrate and the imposition of fines on Acacia Mining certainly caused losses for the company's operations. Re-negotiation regarding contract agreements are offered by the government to the company with certain conditions. This research aims to analyze the negotiation efforts carried out by the Tanzanian government and Acacia Mining to reach an agreement, during the 2017-2020 period. This analysis is based on Bargaining Power theory by Frederick Abbott, where there are three factors on each actor (developing host country and foreign direct investor) that can influence their bargaining position in the negotiation process.

Keywords: *President John Magufuli, Acacia Mining, Mining Policy Reform, Negotiation, Bargaining Power.*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang di wilayah Afrika, Tanzania mengandalkan kekayaan alam yang dimilikinya untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pembangunan, dan menciptakan kesejahteraan di negaranya. Sumber daya mineral yang melimpah membuat Tanzania memiliki potensi besar dalam industri ekstraksi terutama untuk emas, logam dasar, berlian, mineral besi, dan batu permata (Lugoe 2010, 8–9). Industri ekstraktif di Tanzania sendiri telah berkembang sejak tahun 1990-an dan semakin pesat hingga saat ini. Hingga tahun 2021, Tanzania menempati posisi keempat sebagai produsen emas terbesar di kawasan Afrika, setelah Afrika Selatan, Ghana, dan Mali. Sektor pertambangan telah menjadi sektor unggulan dalam perekonomian nasional Tanzania dengan nilai ekspor mineral yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Operasi pertambangan pun berkontribusi sangat besar pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tiga bulan pertama tahun 2021 sebesar 10,2 persen dari PDB atau setara dengan 1,473,804 juta TZS (Tanzania-Mining 2021). Ekspor emas menyumbang sebesar 55,9 persen dari ekspor non-tradisional. *Bank of Tanzania* mencatat ekspor emas Tanzania meningkat sebesar 701,3 juta USD menjadi 3.025,4 juta USD hingga akhir Maret 2021 (The Citizen 2021).

Terdapat dua skala operasi yang mendominasi sektor pertambangan Tanzania, yaitu *large-scale mining* (LSM) atau pertambangan skala besar dan *artisanal and small-scale mining* (ASM) atau pertambangan rakyat dan skala kecil. Kemunculan kembali LSM selama liberalisasi 1990-an, membuat para penambang

ASM tersingkirkan guna memberi ruang bagi operasi LSM yang difasilitasi oleh pemerintah dengan tujuan menarik para investor asing. Hal ini membuat hubungan antara LSM dan ASM tidak berjalan baik dan berlawanan, sehingga sering menimbulkan konflik dan invasi (Pedersen et al. 2019, 340–44). Meskipun ASM telah secara sah ditoleransi oleh pemerintah pada masa kolonial dan awal kemerdekaan, namun pada prakteknya pemerintah cenderung lebih berpihak pada LSM karena dianggap lebih mudah dikontrol dan dikenakan pajak yang menguntungkan pula bagi pembangunan wilayah. Walaupun pada akhirnya sejumlah konflik yang terjadi antara LSM dan ASM telah diselesaikan melalui kompensasi dan sosialisasi, masih ada beberapa pihak, khususnya penduduk setempat yang tidak terima sehingga tidak lagi mempercayai pemerintah dan perusahaan pertambangan asing.

Beberapa negara yang kaya akan sumber daya di Afrika dianggap belum mampu untuk mengelola kekayaan tersebut menjadi pembangunan dan transformasi bidang sosial dan ekonomi dalam skala besar dan hasil yang adil (Poncian and Kigodi 2018, 106–7). Mereka membutuhkan dukungan dari investasi asing langsung dan perusahaan multinasional guna mengembangkan bisnis, inovasi, lapangan pekerjaan, dan tentunya peluang lain yang lebih baik bagi warga negaranya. Untuk itu, pemerintah Tanzania telah membuat keputusan untuk membuka akses terhadap investor asing sejak tahun 1990-an, bersamaan dengan perkembangan dari industri ekstraktif di negaranya.

Kebijakan *Foreign Direct Investment* (FDI) melalui operasi LSM sektor pertambangan ini berhasil menarik perhatian beberapa investor asing dan perusahaan multinasional dari berbagai negara. Tanzania menjadi salah satu negara

tujuan investasi di kawasan Afrika karena dianggap sebagai pintu gerbang utama untuk memperluas bisnis ke negara-negara Afrika lainnya, seperti Zambia, Kongo, Rwanda, dan lainnya. Kerangka hukum *Mineral Policy 1997*, *Mining Act 1998*, dan *Mining Regulations 1999* yang berlaku pada saat itu memberikan akses eksklusif kepada para investor asing pada prospeksi dan perizinan pertambangan di Tanzania, termasuk menghapus persyaratan konten lokal bagi perusahaan multinasional serta keuntungan intensif kepada perusahaan dengan pembebasan dari beberapa pajak, keuntungan penuh, kepemilikan penuh asing, dan lain-lain (Kinyondo and Huggins 2019, 3).

Sejak saat itu, banyak perusahaan pertambangan asing dari berbagai negara melakukan investasi dan ekspansi perusahaan di Tanzania. Salah satunya adalah Acacia Mining. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan emas ini pada awalnya bernama African Barrick Gold, beroperasi di Tanzania dan telah melakukan eksplorasi properti di beberapa negara di kawasan Afrika, seperti Burkina Faso, Mali, dan Kenya. Acacia Mining merupakan perusahaan publik Inggris yang berpusat di London dan telah terdaftar di London Stock Exchange dan Dar es Salaam Stock Exchange (*Bloomberg.Com* 2018). Sebagai penambang emas terbesar di Tanzania dengan jumlah cadangan emas sekitar 19 juta ons dari total 3 tambang yang dikelolanya, perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 sebagai anak perusahaan atau unit dari Barrick Gold yang berasal dari Kanada. Barrick Gold

sendiri sudah terlibat lebih awal dalam pertambangan di Tanzania dan mengakuisisi tiga tambang di wilayah Barat Laut Tanzania, yakni Bulyanhulu, Buzwagi, dan Mara Utara.

Kehadiran perusahaan tambang asing di Tanzania ini dari tahun ke tahun dianggap tidak membawa perubahan atau dampak positif bagi penduduk setempat dan memicu konflik sosial dan lingkungan dengan masyarakat lokal. Keterlibatan Acacia Mining dalam eksplorasi dan eksploitasi mineral di Tanzania selama bertahun-tahun ini telah menimbulkan kasus pencemaran lingkungan, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk lokal, korupsi, hingga sengketa pajak dengan pemerintah (Curtis and Lissu 2008, 23–27). Oleh karena itu, kebijakan negara terkait sektor pertambangan berperan penting guna memastikan pemanfaatan industri ekstraksi oleh perusahaan asing dengan benar dan adil serta perlindungan hak-hak rakyat dari potensi pelanggaran dan kekerasan HAM oleh perusahaan asing.

Pada tahun 2015, John Magufuli dari partai Chama Cha Mapinduzi (CCM) terpilih menjadi presiden Tanzania. Selama masa pemerintahannya, Presiden Magufuli melakukan reformasi dan amandemen kebijakan, terlebih dalam ekstraksi sumber daya di Tanzania, termasuk pertambangan emas. Selain itu, reformasi kebijakan ini merupakan respon dari pemerintah terhadap permasalahan atau isu sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan multinasional asing sektor pertambangan. Di tahun 2017, pemerintah menyetujui peraturan pertambangan baru atas perubahan dari kebijakan *Mining Act 2010* sebelumnya. Reformasi kebijakan ini dianggap bersifat restriktif dengan membatasi aktivitas atau operasional perusahaan tambang asing.

Dalam reformasi kebijakan di tahun 2017 ini, *National Assembly* mengesahkan tiga undang-undang atau kebijakan baru, yaitu *Natural Wealth and Resources Act 2017*, *Natural Wealth and Resources Contracts Act 2017*, dan

Written Laws Act 2017. Kebijakan tersebut didahului oleh *Tanzania Extractive Industries Act (TEIA) 2015* yang membentuk *Tanzania Extractive Industries (Transparency and Accountability) Committee*, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri ekstraktif di Tanzania (Sipemba and Matiko 2021). Undang-undang yang disahkan ini berfokus pada ketentuan untuk meninjau dan menegosiasikan kembali kontrak sumber daya alam yang ada, membentuk komisi pertambangan, dan lain sebagainya. Di samping itu, John Magufuli mengangkat konsep *resource nationalism* pada industri ekstraktif dalam rezim pemerintahannya sebagai strategi politik guna mempertahankan kepentingan nasionalnya (Ahearne 2017).

Atas respon dan tuntutan dari pemerintah dan masyarakat lokal mengenai konflik Acacia Mining, pemerintahan John Magufuli mendeklarasikan pelarangan aktivitas ekspor untuk emas dan konsentrat tembaga di tahun 2017 yang pastinya menyebabkan kerugian bagi perusahaan tersebut (Dzimwasha 2017). Dampak dari reformasi kebijakan selama pemerintahan Presiden John Magufuli ini sangat dirasakan oleh perusahaan multinasional asing yang bergerak di sektor pertambangan, tak terkecuali perusahaan Acacia Mining. Saham Acacia Mining telah turun dan kehilangan sekitar 65% dari nilainya beberapa bulan setelah larangan ekspor diberlakukan, yang mempengaruhi produksi dua dari tiga tambang yang beroperasi di Tanzania atau sekitar sepertiga dari *output* perusahaan (Jamasmie 2017). Harga sahamnya jatuh dalam waktu yang cukup lama karena tidak adanya kesepakatan dengan pemerintah Tanzania. Pada tahun tersebut pun terjadi perselisihan antara pemerintah Tanzania dan Acacia Mining yang mengarah pada sengketa pajak dalam operasi pertambangan.

Menghadapi konflik tersebut, perusahaan Acacia Mining melakukan upaya negosiasi dengan pemerintah Tanzania guna mencapai kesepakatan yang dianggap dapat menguntungkan kedua belah pihak. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai pengaruh perubahan kebijakan tersebut terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan Acacia Mining serta upaya tawar menawar atau negosiasi antara pemerintah Tanzania dan perusahaan multinasional Acacia Mining atas konflik yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya negosiasi antara pemerintah Tanzania dan perusahaan Acacia Mining terkait reformasi kebijakan pertambangan selama masa kepemimpinan Presiden John Magufuli?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh reformasi kebijakan pertambangan Tanzania pada era Presiden John Magufuli terhadap perusahaan Acacia Mining.
2. Untuk menjelaskan bagaimana upaya negosiasi pemerintah Tanzania dan perusahaan Acacia Mining dalam mencapai kesepakatan serta penyelesaian konflik.

1.4 Cakupan penelitian

Periode waktu dalam penelitian ini adalah dari tahun 2017 hingga 2020, yakni saat perusahaan mulai mendapatkan sanksi dari pemerintah berkaitan dengan reformasi kebijakan yang dilakukan, dan pada saat yang sama perusahaan berupaya melakukan negosiasi dengan pemerintah atas hal tersebut hingga mencapai kesepakatan. Tindakan pemerintahan John Magufuli yang tegas dalam melindungi sumber daya ekstraksi dan warga negara Tanzania melalui reformasi kebijakan yang membatasi aktivitas perusahaan asing membuatnya berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah mengenai adanya perubahan dari kebijakan *Mining Act 2010* oleh pemerintah Tanzania yang berdampak pada perusahaan pertambangan, khususnya Acacia Mining. Penelitian ini memilih studi kasus Acacia Mining karena perusahaan ini merupakan investor asing tambang yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Tanzania selama 15 tahun terakhir, dengan besar investasi mencapai lebih dari 4 miliar USD. Perusahaan ini mengoperasikan tiga wilayah tambang di Barat Laut Tanzania, dengan cadangan emas yang dimiliki di Buzwagi sebesar 2,4 juta ons, di Mara Utara sebesar 3,8 juta ons, dan di Bulyanhulu sebesar 13,2 juta ons (Plakhov and Jaffer 2018). Di samping perusahaan ini yang menguntungkan dan telah berkontribusi besar bagi perekonomian nasional Tanzania, eksistensi Acacia Mining telah memicu konflik dengan pemerintah, serta krisis sosial dan lingkungan yang merugikan masyarakat Tanzania. Untuk itu, penulis akan membahas lebih lanjut terkait upaya negosiasi perusahaan asing dan pemerintah negara tuan rumah.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada Jurnal yang berjudul *“Bulldozer Politics, State-making and (neo-) Extractive Industries in Tanzania’s Gold Mining Sector”* oleh Kai Roder menjelaskan mengenai model kebijakan dalam pemerintahan yang dijalankan Presiden John Magufuli. Sektor ekstraktif menjadi salah satu fokus utama yang ada dalam dinamika politik Tanzania diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Tanzania dan warga negaranya. Roder berpendapat bahwa kebijakan sektor ekstraksi Tanzania pasca 2017 tersebut tengah mengarah pada model pembangunan neo-ekstratavis, di mana bukan hanya untuk meningkatkan keuntungan finansial negara dari ekstraksi sumber daya, tetapi lebih pada pembangunan nasional yang lebih inklusif. Larangan ekspor emas dan konsentrat tembaga dikeluarkan oleh Presiden Magufuli pada 2017 atas kasus penipuan, penghindaran pajak, dan kolusi oleh perusahaan multinasional. Hingga akhirnya, Magufuli mendeklarasikan *“economic war”* terhadap perusahaan penipu. Pemerintah menawarkan negosiasi dengan perusahaan mitra, termasuk Barrick Gold atas perselisihan yang terjadi. Dalam hal ini, pemerintah terlihat ingin lebih terlibat dan mengendalikan pengembangan sektor ekstraksi di Tanzania. (Roder 2019)

Dalam jurnal yang berjudul *“Galvanising Political Support Through Resource Nationalism: A Case of Tanzania’s 2017 Extractive Sector Reforms”* oleh Japhace Poncian menganalisis mengenai langkah-langkah dan strategi politik yang digunakan oleh Presiden Magufuli dalam melegitimasi kebijakan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya ekstraksi yang ada di Tanzania. *Resource nationalism* menjadi dasar atas reformasi kebijakan pertambangan yang dilakukan pemerintah pada tahun 2017. Ketidakpuasan rakyat lokal membuat Presiden Magufuli percaya

bahwa sumber daya ekstraksi Tanzania telah dijarah dan dieksploitasi, maka dari itu ia bertindak keras terhadap perusahaan multinasional dan investor asing. Reformasi kebijakan tersebut mencakup transparansi dan pengungkapan kontrak terkait isu topikal dalam politik tata kelola sumber daya yang bersangkutan dengan perusahaan asing, salah satunya Acacia Mining. (Poncian 2019)

Jurnal dengan judul “*The Symptoms of the Shift towards an Authoritarian State in Tanzania’s President John Pombe Magufuli’s Rule*” yang ditulis oleh Emilia Bamwenda menganalisis mengenai perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan masyarakat Tanzania setelah terpilihnya Presiden John Magufuli pada tahun 2015. Tindakannya dalam memerangi korupsi, peningkatan pengelolaan dan penyelarasan regulasi hukum dan pajak, melawan kemiskinan, dan lain sebagainya telah mengubah status Tanzania yang akan menjadi negara berpenghasilan menengah. Berbagai permasalahan seperti korupsi, maladministrasi, dan penggelapan dana yang mempengaruhi aspek politik dan administrasi negara berusaha ditangani dengan reformasi kebijakan yang dijalankan Magufuli. Di tahun 2017, pemerintah memberlakukan undang-undang baru yang menimbulkan perselisihan dengan perusahaan pertambangan. Salah satunya, perusahaan Acacia Mining dituntut untuk membayar sejumlah 190 miliar USD dari pajak, bunga, serta denda yang belum dibayar, dan juga mengancam nasionalisasi tambang. Negosiasi ulang terkait kontrak terus ditekankan Presiden Magufuli terhadap perusahaan multinasional dan investor asing. Tindakannya yang menyangkal pernyataan umum bahwa negara-negara Afrika harus menerima semua FDI tanpa negosiasi membuat Tanzania berhasil memenangkan perselisihan dengan Acacia Mining yang berdampak baik bagi perekonomian negara. Namun, di sisi

lain, kebijakan dan tindakan resesifnya tersebut dianggap telah menimbulkan risiko terhadap hak asasi manusia, kebebasan politik, serta pengembangan sektor swasta dan FDI yang dapat merugikan negara ke depannya. (Bamwenda 2018)

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Tanzania di bawah kepemimpinan Presiden John Magufuli telah berhasil membawa perubahan ekonomi yang baik bagi Tanzania dengan adanya reformasi kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2017, terlebih dalam sektor ekstraktif dan sumber daya. Adanya undang-undang baru ini telah berdampak pada operasional perusahaan multinasional sektor tambang seperti Acacia Mining di Tanzania. Tindakan tegas pemerintah terhadap MNC dan investor asing atas perselisihan serta krisis sosial dan lingkungan yang terjadi membawa kedua pihak melakukan negosiasi ulang terkait kontrak sumber daya dan lain-lain. Namun, penelitian di atas tidak secara langsung menganalisis mengenai upaya dari masing-masing aktor, baik pemerintah Tanzania maupun perusahaan Acacia Mining dalam melakukan negosiasi dan meningkatkan kekuatannya guna mencapai kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan menganalisis bagaimana proses dari upaya negosiasi yang dilakukan pemerintah Tanzania dengan perusahaan Acacia Mining yang beroperasi di Tanzania hingga mencapai kesepakatan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori *Bargaining Power* atau tawar-menawar yang ditulis oleh Frederick M. Abbott.

Teori tawar-menawar ini dikembangkan untuk menggambarkan proses negosiasi berkelanjutan dalam hubungan antara investor asing langsung (FDI) dan pemerintah *host country* di negara berkembang. Perubahan hubungan kekuatan ekonomi antara investor asing dan pemerintah *host country* akan mempengaruhi kondisi investasi atau operasional perusahaan asing yang akan dirasakan para investor (Abbott 1975). Teori *bargaining power* dapat mengukur kemampuan suatu aktor untuk bernegosiasi dan saling mempengaruhi. Sejauh mana aktor yang terlibat dapat meningkatkan *bargaining power* yang dimilikinya untuk mempengaruhi aktor lain sebagai lawannya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.

Terdapat beberapa faktor yang menentukan *bargaining power* dari negara tuan rumah berkembang. Pertama adalah sumber daya ekonomi, semakin berharga sumber daya yang dimiliki negara tuan rumah, semakin besar tingkat kontrol monopoli yang dipertahankan negara atas sumber daya tersebut, serta semakin tinggi posisi *bargaining power* ekonomi negara tuan rumah terhadap investor asing. Kedua adalah kebutuhan pembangunan negara berkembang dan nilai FDI, hal ini dilihat dari pandangan para perencana pembangunan terhadap peran FDI dalam proses pembangunan, apakah positif atau negatif. Posisi *bargaining power* pemerintah akan semakin kuat apabila memiliki pandangan negatif terhadap investasi asing langsung yang membuat negara-bangsa kehilangan kendali atas ekonomi dan masa depannya. Dan ketiga adalah otoritas berdaulat, di mana pemerintah berdaulat untuk memberlakukan dan mengubah kebijakan atau undang-undang domestik atas operasional perusahaan multinasional maupun investor asing.

Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang menentukan *bargaining power* dari perusahaan atau investor asing. Pertama adalah sumber daya ekonomi

(*economic resources*), ada empat utamanya sumber ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan multinasional atau transnasional di negara maju dan berkembang, yakni modal investasi, teknologi, keahlian manajerial, dan pasar internasional. Maka dari itu, *bargaining power* investor asing bergantung pada upayanya dalam mengontrol sumber daya dan kepentingannya terhadap negara tuan rumah. Kedua adalah motivasi perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek industri ekstraktif di negara tuan rumah. Alasan dan faktor dari investor asing dalam menjalin hubungan dengan negara berkembang harus diperhitungkan saat menganalisis *bargaining power*. Dan ketiga adalah bantuan hukum atau intervensi diplomatik, di mana pemerintah *host country* memiliki kekuatan untuk memanipulasi hukum domestiknya yang mengarah pada perubahan hubungan negaranya dengan investor asing.

Pada penelitian ini, pemerintah Tanzania menggunakan kedaulatannya untuk mengubah kebijakan sumber daya ekstraksi di negaranya, termasuk sektor pertambangan guna memperkuat posisi *bargaining power* atas perusahaan tambang asing, yang dalam penelitian ini adalah perusahaan Acacia Mining. Reformasi kebijakan pertambangan yang dilakukan *host country* menimbulkan dampak signifikan terlebih dalam aspek ekonomi dan finansial perusahaan Acacia Mining. Sehingga perusahaan tersebut pun berupaya untuk menandingi pemerintah Tanzania dengan memperkuat *bargaining power* melalui pengelolaan sumber daya dan intensinya terhadap pemerintah. Maka dari itu, teori *bargaining power* ini akan menganalisis proses dari negosiasi antara pemerintah Tanzania dan perusahaan Acacia Mining untuk mencapai kesepakatan investasi. Ditambah strategi yang digunakan oleh kedua aktor tersebut pun pastinya memiliki tujuan yang berbeda-beda.

1.7 Argumen Sementara

Reformasi kebijakan sumber daya ekstraksi di Tanzania dilakukan oleh pemerintahan John Magufuli di tahun 2017 sebagai respon atas krisis sosial yang terjadi oleh perusahaan Acacia Mining yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat lokal. Menurut teori *bargaining power*, tindakan pemerintah Tanzania selaku *developing host country* dengan mengubah undang-undang pertambangan adalah bentuk otoritas kedaulatan yang dilakukan guna memperkuat *bargaining power* terhadap perusahaan Acacia Mining dan dengan tujuan untuk mempertahankan sumber daya yang dimilikinya. Di samping itu, dengan dampak yang dirasakan oleh perusahaan ini, jika ditinjau dari teori *bargaining power*, Acacia Mining berupaya untuk melakukan negosiasi terkait kontrak dalam pengelolaan tambang emas di Tanzania sehingga memperoleh persyaratan yang tidak terlalu menuntut untuk dapat tetap melanjutkan aktivitas penambangannya di Tanzania. Perusahaan Acacia Mining menunjukkan bahwa mereka dapat mengelola sumber daya ekstraksi yang dimiliki Tanzania dengan baik, salah satunya dengan meningkatkan cadangan emas di wilayah tambang yang dikelolanya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Tanzania. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang disetujui bersama.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif melalui studi literatur terhadap objek yang akan diteliti. Metode ini akan menguraikan ucapan, tulisan, bahkan perilaku dari suatu

individu, kelompok, masyarakat, dan atau komunitas tertentu yang diamatinya dengan mendalam. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan pengamatan pada fenomena dengan *setting* alami yang terjadi di dunia yang kemudian dipahami atau ditafsirkan dengan suatu teori, konsep, atau makna tertentu. Penelitian ini mencakup berbagai metode, seperti observasi, studi kasus, penyelidikan, metode audio-visual, dan analisis interpretatif (Denzin and Lincoln 2011). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini, penulis dapat memahami permasalahan secara detail dan mendalam guna menghasilkan penelitian yang sistematis dan saling terhubung.

1.8.2 *Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Tanzania selaku *host country* dan Acacia Mining selaku perusahaan tambang asing yang beroperasi di Tanzania. Sebagai respon dari konflik sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan Acacia Mining, maka pemerintah Tanzania melakukan reformasi kebijakan pertambangan yang pastinya berdampak pada perusahaan tambang asing tersebut. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah upaya negosiasi yang dilakukan pemerintah Tanzania dan perusahaan tambang Acacia Mining sebagai upaya dalam mencapai kesepakatan bersama.

1.8.3 *Metode Pengumpulan Data*

Pada penelitian kualitatif ini, metode yang akan digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah melalui data sekunder atau dengan melakukan studi literatur. Sumber data atau informasi dalam penelitian ini akan diperoleh dari buku, jurnal, laporan resmi pemerintah dan perusahaan terkait, maupun artikel yang

memiliki keterkaitan atau hubungan yang sama dengan topik penelitian ini. Dalam memperoleh data sekunder dalam penelitian kualitatif, penulis akan memperhatikan kesesuaian periode waktu, relevansi, dan akurasi antara sumber data dan topik penelitian yang dibahas.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan melakukan proses analisis data. Sebelum melakukan analisis, penulis akan melakukan riset untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan lainnya yang bersifat kredibel. Tahapan berikutnya adalah proses menganalisis data secara sistematis yang dimulai dengan menyusun data yang diperoleh dari studi literatur atau kajian pustaka agar lebih mudah dipahami, kemudian mengolah dan menelitinya hingga mendapatkan kesimpulan dari topik dan rumusan masalah yang diajukan penulis.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam memahami isi dan menguraikan pembahasan terkait penelitian ini, maka penulisannya akan disusun secara sistematis ke dalam empat bab, yakni sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang dari topik penelitian yang dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi pembahasan yang menjelaskan mengenai perubahan atau reformasi kebijakan yang dilakukan pemerintahan Tanzania era Presiden John

Magufuli. Hal ini mencakup hubungan antara pemerintah Tanzania dan perusahaan Acacia Mining, latar belakang dan implementasi reformasi kebijakan yang dilakukan, serta menjelaskan dampak dari reformasi kebijakan terhadap aktivitas atau operasional perusahaan tambang asing Acacia Mining dan respon perusahaan atas dampak tersebut.

Bab III berisi pembahasan mengenai analisis dari upaya negosiasi ulang terkait kontrak dalam reformasi kebijakan yang dilakukan antara pemerintah Tanzania dan perusahaan Acacia Mining hingga mencapai kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Dalam bab ini penulis akan menganalisis topik terkait dengan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni teori *bargaining power*.

Bab IV berisi kesimpulan yang diambil dari poin-poin pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

REFORMASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN

2.1. Dinamika Hubungan Pemerintah Tanzania dan Acacia Mining

Terbukanya akses bagi perusahaan multinasional asing untuk beroperasi di Tanzania mendorong Acacia Mining, perusahaan asal Inggris yang bergerak di bidang pertambangan emas untuk berinvestasi di Tanzania mulai tahun 2000. Barrick Gold yang merupakan perusahaan induknya sudah terlibat lebih awal dalam pertambangan Tanzania dengan mengakuisisi 3 wilayah tambang di wilayah Barat Laut Tanzania. Industri ini melihat Tanzania memiliki potensi yang bagus untuk produksi emas mereka ke depannya karena lokasinya yang strategis dan bisa menjadi pintu utama untuk lebih memperluas bisnisnya ke negara lain di kawasan Afrika. Ditambah kebijakan pada saat itu yang dinilai tidak terlalu ketat dengan tarif pajak rendah dan sedikit pengawasan pengaturan oleh pemerintah. Cadangan emas yang dimiliki perusahaan Acacia Mining di Tanzania adalah sebesar 2,4 juta ons di Buzwagi, 3,8 juta ons di Mara Utara, dan 13,2 juta ons di Bulyanhulu. Kontribusinya berupa investasi dalam perekonomian Tanzania mencapai 4 miliar USD. (Plakhov and Jaffer 2018)

Tabel 1. Cadangan Emas Perusahaan Tambang di Tanzania

Name of Mine and Owner	Location	Employment	Total Investment (in Million US\$)	Total Payment of Taxes and Royalties (in Million US\$)	Proven reserves (million ounces)	Current annual production (ounces)	Lifespan of the mine (years)
Buzwagi Gold Mine. Owned by Pangea Minerals Ltd; Subsidiary of Barrick Gold Corporation (Canada)	Kahama District, Shinyanga Region	696; of whom 630 Tanzanians (91%).	372	Production yet to start	2.4	225,000 (Expected)	10
Bulyanhulu Gold Mine. Owned by Bulyanhulu Gold Mine Ltd; Subsidiary of Barrick Gold Corporation (Canada)	Kahama District, Shinyanga Region	1,913; of whom 1,710 Tanzanians (89%)	610	15.18 (Royalties); 68.28 (other taxes)	13.2	330,000	30
North Mara Gold Mine. Owned by North Mara Gold Mines Ltd; Subsidiary of Barrick Gold Company (Canada)	Tarime District, Mara Region	1,103; of whom 923 Tanzanians (84%)	Figures not available	9.5 (Royalties); 20.92 (other taxes)	3.8	269,000	12
Tulawaka Gold Mine. Joint Venture between Pangea Minerals Ltd (Subsidiary of Barrick Gold Company (Canada) (70%) and Minieres du Nord (Canada) 30%)	Biharamulo District, Kagera Region	508; of whom 481 Tanzanians (95%)	Figures not available	2.0 (Royalties); 5.2 (other taxes)	0.565	120,000	5
Geita Gold Mine. Owned by AngloGold Ashanti Limited	Geita District, Mwanza Region	2,296; of whom 2,222 Tanzanians (97%)	450	36.0 (Royalties); 37 (other taxes)	16.95	560,000	20

Sumber: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 2008

2.1.1 Perlakuan Negatif Perusahaan terhadap Masyarakat dan Pemerintah

Seiring berjalannya waktu, eksistensi Acacia Mining di Tanzania terlihat tidak membawa dampak positif, masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. Sebaliknya, beberapa masyarakat lokal melaporkan tindakan dan perlakuan negatif yang dilakukan perusahaan. North Mara Gold Mine (NMGM), sebagai perusahaan tambang lokal di wilayah Mara Utara Tanzania yang dikelola oleh Acacia Mining menjadi tambang yang paling diperdebatkan dan sering dilaporkan di Tanzania karena konflik yang sering terjadi antara otoritas keamanan tambang dan masyarakat lokal (Lauwo, Kyriacou, and Julius Otusanya 2020). Salah satunya, pada Juli 2013, sekelompok masyarakat Tanzania mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Inggris terhadap Acacia Mining dan North Mara Gold Mine (NMGM) atas tuduhan keterlibatan perusahaan dalam pembunuhan dan penyerangan kepada penduduk lokal yang terjadi beberapa tahun sebelumnya.

Insiden terkait kasus hak asasi manusia ini terjadi pada tahun 2011, saat masyarakat desa sering memasuki wilayah tambang NMGM untuk mengumpulkan batu dan berharap dapat menemukan emas untuk dibawa pulang. Polisi dan otoritas keamanan tambang perusahaan disebutkan telah menembak penduduk desa dengan gas air mata dan peluru tajam, hingga menewaskan kurang lebih lima orang dan lainnya terluka parah. (Vidal 2013) Masyarakat melaporkan bahwa perusahaan telah gagal mengekang penggunaan kekuatan yang berlebihan di wilayah tambang, termasuk yang dilakukan polisi secara terus-menerus dan dalam kurun waktu yang cukup lama.

Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh perusahaan dengan mengatakan bahwa penduduk lokal telah keliru dengan menganggap bahwa emas tersebut adalah milik masyarakat setempat, dan yang mereka lakukan untuk mencari jejak emas pada wilayah tambang perusahaan adalah tindakan ilegal. Pihak perusahaan merasa telah diserang oleh ratusan penduduk desa di wilayah tambang Mara Utara untuk pencarian emas. Maka dari itu, polisi dan otoritas tambang bertugas untuk mengendalikan situasi dan tanpa diduga telah menewaskan dan melukai beberapa pihak. Menanggapi tuduhan tersebut, perusahaan bersikeras untuk tidak akan memberikan kompensasi atas tuntutan hukum yang tidak sah, ditambah insiden penyerangan tahun 2011 terjadi diakibatkan karena adanya penyusup yang menyerang tambang yang mengarah pada tindakan kriminal. Melalui perintah dari pengadilan Inggris, firma hukum Leigh Day yang mewakili penduduk desa Tanzania dalam klaim kasus perusahaan tambang mewajibkan Acacia Mining untuk mengungkapkan dokumen internal terkait operasional perusahaan, serta mengambil langkah lanjut untuk ke persidangan. Hingga akhirnya di awal tahun

2015, kasus tersebut mencapai penyelesaian di luar pengadilan dengan kelompok penggugat. Acacia Mining telah setuju untuk menyelesaikan permasalahan dan pembayaran kompensasi dengan kelompok penggugat di luar pengadilan dengan dalih ingin tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar tambang Mara Utara. (*Business & Human Rights Resource Centre* 2013)

Di sisi lain, laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat setempat yang dilakukan oleh aparat keamanan perusahaan terus berdatangan, mencakup pembunuhan, penyerangan, bahkan kekerasan seksual. Dalam rentan waktu tahun 2014 hingga 2016, *Mining Watch Canada* dan *Rights and Accountability in Development* (RAID) menerima laporan terjadinya 22 pembunuhan dan 69 cedera di sekitar wilayah tambang Mara Utara. Penyelidikan parlemen Tanzania pun menerima laporan 65 orang tewas dan 270 terluka, pelanggaran ini diduga dilakukan oleh polisi yang bertanggung jawab atas keamanan tambang perusahaan Acacia Mining (RAID 2019).

Tidak hanya dengan masyarakat lokal, Acacia Mining juga mengalami permasalahan atau perselisihan dengan pemerintah Tanzania. Perusahaan ini terlibat dalam beberapa perilaku bisnis ilegal seperti korupsi, penipuan, dan penghindaran pajak. Perilaku buruk perusahaan ini disampaikan secara terang-terangan dan terbuka oleh presiden John Magufuli dalam pidatonya di depan umum dan telah mendominasi di berbagai media lokal bahkan internasional di tahun 2017. Kenyataan ini dinilai tidak sejalan dengan klaim strategi Acacia Mining yang disampaikan bahwa mereka bekerja tanpa bahaya, fokus tambahan pada dialog pemerintah, penyampaian komitmen masyarakat, dan meningkatkan profil hubungan masyarakat (Cole 2017). Pada 2018, beberapa karyawan eksekutif

perusahaan, diantaranya yaitu Deodatus Mwanyika, Alex Lugendo, dan Assa Mwaipopo ditahan oleh otoritas anti-korupsi Tanzania atas dugaan pencucian uang dan penggelapan pajak. Tertulis dalam lembar dakwaan bahwa perusahaan dan karyawan terdakwa telah melakukan transaksi ilegal senilai 1,5 juta USD hingga 752 juta USD per pembayaran sejak tahun 2008 sampai 2018 untuk kepentingan bisnisnya. Pada satu transaksinya, senilai 719 juta USD dikirim ke rekening pejabat pemerintah. (*Reuters* 2018) Acacia mengatakan bahwa semua terdakwa mengaku tidak bersalah atas semua 39 dakwaan tindak pidana yang mencakup penggelapan pajak, konspirasi, pemalsuan dan pencucian uang, serta korupsi. Tuduhan dari Biro Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Tanzania tersebut disebut merupakan salah satu bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terkait eksploitasi sumber daya alam dan perang yang dilakukan pemerintah pada sektor mineral. (Jamasmie 2018)

Hubungan kompleks antara pemerintah Tanzania dan Acacia Mining semakin diperparah dengan operasional perusahaan tambang di Mara Utara yang juga menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar wilayah tambang. Adanya kegagalan dari fasilitas penyimpanan tailing tambang dan dugaan pembuangan zat berbahaya dari tambang menyebabkan polusi yang cukup parah di daerah tersebut. Dewan Manajemen Lingkungan Nasional Tanzania (NEMC) mengatakan akan mengenakan denda atas kasus lingkungan yang terjadi dan terus menekan Acacia Mining dengan mengeluarkan Perintah Perlindungan Lingkungan (EPO) karena dugaan kurangnya fasilitas tailing. Pihak Acacia Mining menyebutkan bahwa mereka belum menerima informasi yang cukup dari pemerintah terkait dengan EPO dan menghubungi NEMC untuk meminta klarifikasi atas laporan yang ada serta

meminta bantuan untuk penyelesaian perselisihan tersebut. (Casey 2019) Berbagai jenis kasus yang dilaporkan dengan mengatasnamakan perusahaan Acacia Mining plc menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi reformasi kebijakan pertambangan yang dilakukan pemerintah Tanzania beberapa tahun ke belakang.

2.1.2 Pengungkapan Pemerintah Tanzania terhadap Kasus Acacia Mining

Kekecewaan publik terhadap kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Kikwete, mendorong partai Chama Cha Mapinduzi (CCM) memilih John Magufuli sebagai kandidat presiden karena reputasinya yang cukup baik sebagai seorang yang jujur, pekerja keras, bebas korupsi dan tanpa skandal dengan tujuan untuk mengubah citra partai serta mengembalikan kepercayaan publik. Hal tersebut tergambar pada posisi yang diduduki Magufuli sebelumnya. John Pombe Joseph Magufuli terpilih sebagai Anggota Parlemen untuk mewakili distrik Chato dan diangkat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan pada periode tahun 1995 hingga 2000, setelah menerima gelar master dalam Kimia dari Universitas Dar es Salaam di tahun 1994 dan saat ia berprofesi sebagai ahli kimia industri di Nyanza Cooperative Union Limited. Karir politiknya terus berlanjut dengan posisinya sebagai Menteri Pekerjaan, Perhubungan dan Komunikasi di tahun 2000 hingga 2005. Di tahun 2006, Presiden Tanzania yang menjabat pada saat itu menempatkan John Magufuli sebagai Menteri Pertahanan dan Pemukiman hingga tahun 2008. Lebih lanjut, pada periode 2008 hingga 2010, Magufuli menjabat sebagai Menteri Peternakan dan Perikanan. Ia kembali menjabat sebagai Menteri Pekerjaan untuk kedua kalinya pada periode 2010 hingga 2015. (Momodu 2021)

Hingga pada tahun 2015, John Magufuli dicalonkan oleh Partai CCM dalam Pemilu Presiden Tanzania 2015. Meskipun sebelumnya, Magufuli bukan menjadi

kandidat utama di tengah perpecahan dalam elite penguasa Partai CCM, bahkan ia tidak pernah terlibat dalam lingkaran pemerintahan CCM. Pada Oktober 2015, John Magufuli dinyatakan sebagai pemenang dan terpilih menjadi Presiden Tanzania dengan menerima 58% suara, mengalahkan kandidat Edward Lowassa dari Partai Chadema. Kampanye politik John Magufuli selama pemilu mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi kemiskinan dan memerangi perlakuan tidak etis mencakup korupsi, kekeluargaan pejabat dalam aktivitasnya, serta eksploitasi sumber daya. Penggambaran kampanyenya selalu mengacu pada situasi sulit masyarakat Tanzania yang tinggal di pedesaan untuk lebih menjangkau masyarakat secara luas. Hingga John Magufuli terpilih menjadi presiden, banyak rakyat Tanzania yang memuji kepemimpinannya yang tegas sesuai dengan janji kampanyenya. (Bamwenda 2018) Selama karirnya menjadi politikus di Tanzania, John Magufuli mendapat julukan “*Bulldozer*” karena tindakannya yang tegas memerangi korupsi dan pengeluaran pemerintah yang tidak penting. Reputasinya yang baik didukung dengan rekor bersih Magufuli yang bebas korupsi dan tanpa skandal selama karir politik yang dijalankannya. (Kwayu 2021)

Di awal kepemimpinannya, presiden John Magufuli sudah mulai menerapkan tujuan kampanye dalam pemilunya dengan memberantas korupsi, memperbaiki manajemen dan menyelaraskan peraturan hukum dan pajak, pemungutan pajak, memberantas kemiskinan, serta pemborosan pengeluaran yang terjadi. Diantaranya dengan melakukan pemotongan biaya dan pembebasan pajak, membatasi perjalanan ke luar negeri oleh pejabat pemerintah, serta mengarahkan pejabat untuk turun langsung ke masyarakat pedesaan untuk mengatasi permasalahan di sana. Pertengahan tahun 2017, pemerintah mendeklarasikan

“*economic war*” terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai telah merugikan dan melakukan eksploitasi atas kekayaan ekstraksi negara, termasuk terhadap Acacia Mining. Pemerintah mengumumkan tiga undang-undang yang dimaksud untuk memaksimalkan pendapatan pemerintah, mengembangkan konten lokal, dan pengakuan kepemilikan berdaulat yang sah atas mineral oleh rakyat Tanzania. Akses perusahaan ke arbitrase internasional dihapus dan membuka negosiasi kembali atau konsultasi lebih lanjut dengan pemerintah terkait kontrak yang ada. Kementerian Energi dan Mineral telah mengumumkan larangan ekspor pasir mineral, terlebih untuk konsentrat emas dan tembaga kepada perusahaan Acacia Mining (Jacob and Pedersen 2018).

Pemerintah mengutus dua Komite Kepresidenan Tanzania, dikhususkan untuk menyelidiki tuduhan penipuan kepada perusahaan multinasional Acacia Mining yang telah menolak royalti dan keuntungan yang sah dari Tanzania (Kinyondo and Huggins 2019). Komite pertama yang terdiri dari akademisi dan profesional industri, menyelidiki kontainer-kontainer Acacia di pelabuhan Dar es Salaam dan telah melaporkan terdapat penipuan besar-besaran dalam ekspor pasir mineral (konsentrat). Kontainer yang disita oleh komite memiliki nilai emas yang lebih besar dibandingkan yang tercatat secara resmi. Ditemukan wadah dengan rata-rata 1.400 gram emas per ton pasir mineral, berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Badan Audit Tanzania sebelumnya, yakni sebesar 200 gram. Komite pertama juga melaporkan perbedaan rasio tembaga dan perak, sedangkan royalti yang dibayarkan oleh perusahaan adalah untuk konsentrat lain seperti besi, belerang, iridium, rhodium, dan litium.

Komite kedua yang terdiri dari ekonom dan pengacara menyelidiki aspek hukum dan fiskal dari kesepakatan yang ada antara Acacia dan pemerintah. Komite ini melaporkan bahwa terdapat sebagian besar kontainer (44.277 hingga 61.320 kontainer) yang dikirim ke luar negeri sejak awal aktivitasnya hingga 2017 namun belum diumumkan oleh Acacia Mining untuk keperluan pajak. Hal ini menyebabkan negara kehilangan antara 68.59 triliun TZS dan 108.45 triliun TZS selama periode tersebut. Ketua komite tersebut pun melaporkan bahwa selama 19 tahun, Acacia Mining gagal membayar pajak penghasilan sejumlah 95.5 triliun TZS, pemotongan pajak sejumlah 94.4 triliun TZS, royalti tambang sebesar 11.1 triliun TZS, dan pajak dari biaya pengiriman yang tidak diumumkan sebesar 1.6 triliun TZS. (Shiyo 2017)

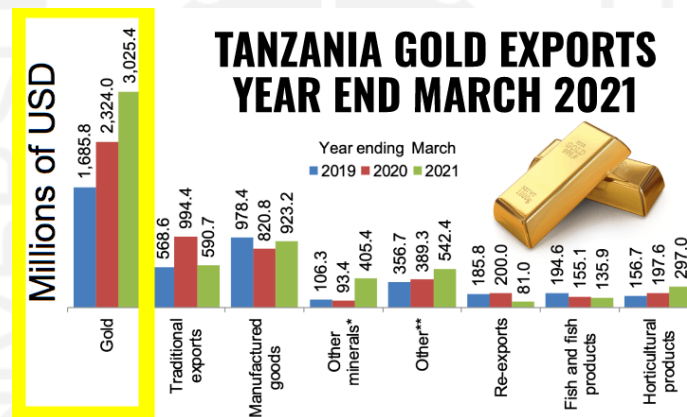
Setelah laporan dari dua komite disampaikan, Presiden John Magufuli mengarahkan otoritas lain seperti Biro Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki lebih lanjut pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak pertambangan antara pemerintah dan Acacia Mining. Juga memerintahkan perusahaan tersebut untuk membayar royalti dan tunggakan pajak yang dilakukan selama kurang lebih 19 tahun sebagai syarat untuk perusahaan dapat tetap melanjutkan operasionalnya. Presiden Magufuli meminta semua kebijakan dan perjanjian terkait sektor ekstraksi untuk disusun kembali demi melindungi kepentingan nasional dan eksploitasi sumber daya. (Shiyo 2017)

2.2. Tahapan dan Implementasi Reformasi Kebijakan Pertambangan

Tanzania dianggap sebagai negara pertambangan yang relatif baru di wilayah Afrika. Sektor pertambangannya dinasionalisasikan pada tahun 1967 dan perusahaan STAMICO (*State Mining Corporation*) didirikan pada tahun 1972 guna

mengoperasikan sektor tersebut (Lange 2011). Operasi sektor pertambangan berkontribusi besar pada Produk Domestik Bruto nasional Tanzania dengan nilai ekspor yang meningkat secara signifikan. Pada tiga bulan pertama tahun 2021 sektor tambang berkontribusi sebesar 10,2 persen dari PDB nasional atau setara dengan 1.473.804 juta TZS (Tanzania-Mining 2021). Ekspor emas menyumbang sebesar 55,9 persen dari ekspor non-tradisional. *Bank of Tanzania* mencatat ekspor emas Tanzania meningkat sebesar 701,3 juta USD menjadi 3.025,4 juta USD hingga akhir Maret 2021 (The Citizen 2021).

Grafik 1. Nilai Ekspor Emas Tanzania Tahun 2019-2021



Sumber: Tanzania Invest 2021

2.2.1 Sektor Pertambangan Tanzania Era Pra Reformasi Kebijakan

Sebelum reformasi ekonomi terjadi di Tanzania, pemanfaatan kekayaan alam masih sangat minim atau bahkan belum sama sekali dilakukan, terlebih belum ada kebijakan yang mengarah pada investasi asing terhadap sektor sumber daya yang ada. Operasional pengembangan sektor ekstraksi Tanzania tahun 1970 an hingga 1980 an, sebagian besar dimiliki dan dioperasikan oleh negara di bawah *National Development Corporation* (NDC), dan kemudian oleh *State Mining Corporation* (STAMICO). Pada masa tersebut, investasi asing dianggap

kapitalistik dan eksploitatif, sesuai dengan ideologi Tanzania pada tahun 1967, yaitu “*Ujamaa na Kujitegemea*” atau “Sosialisme dan Kemandirian” yang dicetuskan oleh Mwalimu Julius Nyerere melalui Deklarasi Arusha sebagai upaya untuk menyelaraskan atau membaurkan nilai-nilai tradisional Afrika dengan tuntutan sistem pasca kolonial. Mwalimu Nyerere ingin membangun Tanzania menjadi negara sosialis yang mandiri dengan mengupayakan apa yang dapat mereka lakukan dengan sumber daya yang mereka miliki sendiri guna mendapatkan manfaat dari tata kelola tersebut. Juga menentang kapitalisme yang dianggap membangun masyarakatnya di atas eksploitasi yang dilakukan. (M. I. Muhanga 2016)

Reformasi ekonomi akhirnya terjadi pada tahun 1980an setelah krisis keuangan yang dihadapi Tanzania dan berupaya meningkatkan pembangunan melalui reformasi tersebut. Begitupun dengan perubahan kerangka hukum dan kebijakan pendukung lainnya di sektor pertambangan yang dilakukan seiring dengan reformasi yang terjadi. Perkembangan industri ekstraktif di Tanzania berpotensi mendorong pembangunan dan perekonomian negara tersebut menjadi lebih maju. Bank Dunia (1992) bahkan menyarankan pemerintah Afrika, termasuk Tanzania, untuk berfokus pada sektor pertambangan sebagai upaya untuk menghasilkan pendapatan yang dapat meningkatkan perekonomian nasional. Dengan pemanfaatan yang efektif dan terstruktur, sektor pertambangan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Untuk itu, Bank Dunia mendukung adanya reformasi sektor pertambangan di Tanzania, mencakup kerangka hukum dan undang-undang yang berlaku. Pada periode tahun 1980-an hingga 1995, kegiatan pertambangan lokal dan skala kecil (ASM) mulai

berkembang pesat dan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam penambangan emas. Meskipun tingkat teknologi pada saat itu masih sangat rendah dan kegiatannya belum memiliki hak milik formal atau dianggap ilegal. (M. I. Muhanga 2016, 33)

Pemerintah membuat undang-undang atau kebijakan dengan membuka akses kepada investor asing untuk dapat beroperasi di wilayah tambang di Tanzania. Dengan harapan membuka peluang lain yang lebih baik bagi masyarakat Tanzania. Melalui FDI, Tanzania memiliki peluang untuk memberikan insentif fiskal dan konsesi regulasi, seperti *tax holiday*, *tax reduction*, dan *exemption* kepada perusahaan asing yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat FDI yang lebih besar ke dalam negeri terlebih dalam sektor pertambangan. Insentif lainnya dapat berupa Perjanjian Pengembangan Pertambangan individu yang telah ditandatangani pemerintah, serta bea masuk nol untuk barang modal, suku cadang, kendaraan, dan persediaan lainnya hingga waktu tertentu. (Maliganya and Bengesi 2018)

Kebijakan *Foreign Direct Investment* untuk investor asing yang beroperasi di Tanzania disahkan pada tahun 1990-an, dengan kerangka hukum *Mineral Policy 1997*, *Mining Act 1998*, dan *Mining Regulations 1999*. Seiring berjalannya waktu, terbukanya akses bagi investor asing dan sektor swasta dalam perekonomian menyebabkan munculnya tantangan dalam sektor tersebut, ditambah dengan operasional perusahaan yang dianggap membawa dampak negatif dan memicu konflik. Untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam industri pertambangan, pemerintah Tanzania harus melakukan berbagai perubahan atau reformasi dari kebijakan tersebut.

2.2.2 Proses Reformasi Kebijakan Pertambangan Tanzania

Perubahan kondisi pasar dan teknologi harus diiringi dengan perubahan kebijakan dan strategi baru yang dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi domestik suatu negara, salah satunya pada sektor pertambangan. Pada tahun 1998, pemerintah Tanzania mengesahkan undang-undang pertambangan baru untuk menggantikan *Mining Act 1979*. Kebijakan ini dirumuskan sehubungan dengan program reformasi ekonomi 5 tahun Bank Dunia (*World Bank*) guna memenuhi syarat permohonan keringanan hutang. Fokus dari undang-undang ini adalah menciptakan atau membuka akses bagi investor asing di sektor pertambangan, serta memberikan hak dan ruang yang sama bagi *large-scale miners* (LSM) dan *small-scale miners* (ASM) dalam operasional perusahaannya.

Terdapat tawaran dan persyaratan yang menarik bagi para investor asing, yakni tarif royalti untuk mineral sebesar 3 persen (5 persen untuk berlian), pajak penghasilan sebesar 30 persen dan tidak ada tambahan untuk pajak keuntungan, tidak ada biaya bea masuk atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas peralatan tambang, pemotongan pajak atas dividen adalah sebesar 10 persen dan gaji ekspatriat adalah sebesar 3 persen, dan pemberian hak pertambangan tersebut dapat dialihkan dan digadaikan. (Butler 2004) Namun, amandemen perlu dilakukan pada kebijakan *The Mining Act of 1998* oleh pemerintah Tanzania. Salah satu faktornya dikarenakan penetapan royalti untuk batu mulia olahan dianggap kurang efektif. Selain itu, tantangan yang muncul yang dihadapi sektor pertambangan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat lokal. Maka pemerintah telah mencabut seluruh kebijakan *Mining Act 1998* dan menggantinya dengan *Mining Act 2010* yang mengarah pada penguatan sektor pertambangan.

Fokus amandemen kebijakan 2010 adalah penetapan eksplorasi, pengembangan, serta pemasaran mineral di Tanzania. Adanya dukungan yang diberikan pada integrasi ekonomi yang melibatkan sektor ekonomi mengarah pada peningkatan sektor pertambangan terhadap PDB nasional dan ketenagakerjaan. Masyarakat lokal diarahkan untuk terlibat dalam berbagai proyek masyarakat melalui dukungan perusahaan pertambangan. Dengan kata lain, perusahaan MNC yang berinvestasi di sektor tambang Tanzania didorong untuk melibatkan masyarakat lokal dan otoritas pemerintah daerah dalam pembangunan yang berbasis masyarakat, serta memberikan peluang atau kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah tambang. (M. Muhanga 2022, 44–45)

Komisi khusus yang disebut *Tanzania Mining Commission* dibentuk melalui undang-undang pertambangan tahun 2010 ini dengan tujuan mengatur sektor tambang di Tanzania, yang berfokus pada kontrol pemerintah dalam operasional sektor tambang dan peningkatan royalti. Mendorong pihak yang terlibat dalam sektor pertambangan untuk mendukung *local content* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Pemerintah Tanzania menekankan hak bagi negara untuk dapat melakukan renegotiasi dengan para pihak pengelola apabila terjadi tindakan yang merugikan dan tidak bermoral. Hal tersebut berhasil meningkatkan royalti bagi negara Tanzania, dengan pemerintah untuk mendapatkan bagian dalam proyek pertambangan di masa depan dan membatasi kontribusi para pihak asing dalam operasional pertambangan skala kecil. Meskipun peraturan dalam *Mining Act 2010* terus ditingkatkan dan terkesan semakin ketat, upaya pemerintah dalam mendorong investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri pun terus dilakukan.

Sejak kekuasaan Presiden John Magufuli pada tahun 2015, banyak upaya yang dilakukan untuk menuju tata kelola dan pengendalian sumber daya alam secara lebih bermanfaat. Termasuk melakukan reformasi terhadap kebijakan *Mining Act 2010*, yang sebelumnya didahului oleh kebijakan *Extractive Industry Transparency and Accountability Act 2015* terkait pemegang hak mineral. Terdapat 2 putaran dalam amandemen terhadap kebijakan pertambangan Tanzania tahun 2010 yang dilakukan pada tahun 2017. Pertama, diajukan dalam *Finance Act 2017* dengan meningkatkan tarif royalti terkait ekspor mineral yang mencakup emas, tembaga, perak, dan platina, dari 4 persen menjadi 6 persen. Selain itu, melalui undang-undang ini terdapat persyaratan baru untuk semua nilai mineral yang akan diekspor ke luar negeri akan dikenakan biaya kliring sebesar 1 persen. Perubahan ini memunculkan banyak perdebatan dari pemangku kepentingan karena dinilai kenaikan tarif royalti akan berdampak negatif bagi investasi asing.

Kedua adalah dalam *Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act 2017*, yang merupakan rekomendasi kepada pemerintah dari Komite Kepresidenan yang menyelidiki ekspor konsentrat mineral oleh perusahaan asing. Amandemen dalam kebijakan ini mengubah persyaratan struktur kepemilikan saham. Pihak Pemegang Izin Pertambangan atau Pemegang Izin Pertambangan Khusus wajib memberikan 16 persen bunga modal perusahaannya. Pemerintah pun berhak memperoleh hingga 50 persen saham di perusahaan tambang yang beroperasi di Tanzania. Hal tersebut dinilai sebanding dengan nilai pengeluaran pajak oleh pemerintah untuk kepentingan perusahaan. Dalam perubahannya, dibentuk Komisi Pertambangan yang berfungsi bukan hanya sebagai penasehat, tetapi juga untuk menerbitkan izin,

mengatur industri dan operasi pertambangan, serta memastikan eksplorasi dan pemanfaatan mineral secara tertib. (Kapdi and Parring 2018)

Di samping itu, pemerintah Tanzania mengesahkan undang-undang baru terkait peraturan kekayaan dan sumber daya alam. Pertama, *Natural Wealth and Resources (Permanent Sovereignty) Act 2017*, fokus kebijakan ini adalah memberikan kedaulatan yang permanen kepada rakyat Tanzania atas semua kekayaan dan sumber daya alam yang ada di negara Tanzania, dan pemerintah yang memiliki dan mengendalikan atas nama rakyat. Maka, tidak akan ada kesepakatan atau pengaturan untuk ekstraksi, eksploitasi, maupun akuisisi dan penggunaan sumber daya kecuali jika kepentingan rakyat dan negara dijamin sepenuhnya. Perselisihan yang terjadi dalam operasional eksplorasi sumber daya akan diadili oleh badan peradilan sesuai dengan hukum Tanzania. Kedua adalah *Natural Wealth and Resources Contracts (Review and Re-negotiation of Unconscionable Terms) Act 2017*, kebijakan ini memastikan semua kekayaan alam dan sumber daya Tanzania dimiliki secara kolektif oleh rakyat Tanzania itu sendiri. Pemerintah memiliki kuasa untuk menegosiasikan kembali ketentuan perjanjian yang dianggap kurang efektif, tidak adil, dan dapat menghambat pembangunan negara.

Amandemen terhadap undang-undang *Mining Act 2010* merupakan upaya pemerintahan John Magufuli untuk lebih meningkatkan kontrol dan pendapatan dari ekstraksi sumber daya yang ada di wilayah nasional Tanzania. Hal tersebut mengarah pada konsep *resource nationalism*, yang terus diperbincangkan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam sistem pemerintahan Tanzania di tahun-tahun tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Magufuli dinilai tegas untuk melindungi sumber daya alam

dan masyarakat Tanzania semakin memperkuat *resource nationalism* di Tanzania. (Poncian 2019, 82) Presiden Magufuli percaya bahwa sumber daya ekstraksi yang dimiliki Tanzania telah dikuasai oleh perusahaan multinasional asing. Maka diperlukan *resource nationalism* sebagai strategi dalam melegitimasi ekstraktivisme dan lebih pro terhadap rakyat negaranya. Salah satunya dengan melakukan amandemen kebijakan pada sumber daya ekstraksi untuk mendorong pembangunan dan perekonomian nasional. Hal ini bukan berarti pemerintah anti terhadap investor asing, melainkan pemerintah terus mempromosikan strategi yang mengakui peran penting dari investor asing di sektor ekstraksi Tanzania untuk mendorong industrialisasi.

Pada tahun 2017, pemerintahan John Magufuli mendeklarasikan klaim kedaulatannya atas sumber daya alam yang ada di wilayah negara Tanzania. Salah satu faktornya adalah sebagai respon dari pemerintah atas tindakan dan operasional perusahaan multinasional atau investor asing sektor tambang di Tanzania yang dinilai telah merugikan negara dan masyarakat Tanzania itu sendiri. Pemerintah menemukan bahwa perusahaan tambang asing telah menolak royalti dan keuntungan yang legal dari Tanzania.

2.3 Respon Acacia Mining terhadap Reformasi Kebijakan

Perusahaan Acacia Mining telah terlibat dalam berbagai risiko terkait perilaku bisnis ilegal yang mencakup korupsi, penipuan, dan penghindaran pajak. Terlebih dengan banyaknya laporan mengenai kekacauan yang sebagian besar terjadi pada wilayah tambang Mara Utara yang menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat (Ndossi 2017). Perselisihan terus meningkat selama 2 tahun,

ditambah dengan beberapa karyawan eksekutif Acacia Mining yang didakwa atas banyak pelanggaran termasuk pencucian uang serta penggelapan pajak, dan telah dipenjara sejak Oktober 2018. (Dausen and Reid 2020)

Deklarasi kebijakan baru tahun 2017 telah berdampak besar pada operasional perusahaan Acacia Mining. Larangan ekspor konsentrat emas dan tembaga telah menimbulkan penumpukan persediaan bijih emas yang dihasilkan serta membuat perusahaan kehilangan pendapatannya lebih dari 1 juta USD setiap harinya di dua wilayah tambang di Tanzania yang dioperasikan (Taylor 2017). Aktivitas tambang di Bulyanhulu yang semakin buruk tidak berkelanjutan mengakibatkan arus kas negatif sekitar 15 juta USD per bulan. Produksi tahunannya menurun mencapai 100.000 ons lebih rendah dari produksi sebelumnya. Hingga perusahaan Acacia terkena tagihan pajak sebesar 190 miliar USD yang setara dengan empat kali PDB tahunan negara Tanzania. Jumlah tersebut terdiri dari 40 miliar USD pajak yang diduga tidak dibayar perusahaan dan 150 miliar USD denda dan bunga yang terhitung. Enam bulan setelah larangan ekspor dilakukan, saham Acacia Mining turun sebesar 65 persen dan memiliki utang sebesar 71 juta USD. (Reuters 2017) Di awal tahun 2019, Tanzania juga mengenakan denda sebesar 300 juta TZS atau setara dengan 129.143 USD kepada Acacia Mining atas tuduhan pelanggaran peraturan lingkungan di wilayah tambang Mara Utara.

Grafik 2. Saham Acacia Mining Sejak Larangan Ekspor Berlaku



Sumber: Mining.com 2017

Upaya mitigasi dilakukan perusahaan Acacia dalam menghadapi reformasi kebijakan sektor pertambangan. Setelah laporan penyelidikan oleh komite khusus yang dibentuk pemerintah terkait ketidaksesuaian jumlah nilai pendapatan ekspor konsentrat emas dengan yang dilaporkan perusahaan yang mengarah pada kasus penipuan serta penghindaran pajak, perusahaan Acacia Mining mencoba untuk menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan telah sepenuhnya melaporkan pendapatan perusahaannya, mencakup materi yang diproduksi dan pembayaran royalti serta pajak secara penuh. (Olingo 2020) Perusahaan menyebutkan tuduhan tersebut tidak akurat dan tidak dapat dijelaskan. Acacia menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah Tanzania namun harus didasarkan pada keadilan bagi seluruh *stakeholder* terkait. Pada Juli 2017, Acacia berupaya memulai arbitrase internasional untuk dua tambangnya (Bulyanhulu dan Buzwagi) untuk melawan Tanzania setelah pemerintah membatalkan perjanjian hak mineral dan memaksa negosiasi ulang kontrak.

Presiden Magufuli mengumumkan akan menutup semua tambang emas di Tanzania apabila pihak perusahaan Acacia Mining menunda pembicaraan atau negosiasi dengan pemerintah terkait penyelesaian sengketa pajak yang dituduhkan.

Meskipun Acacia telah dipisahkan dari Barrick Gold tahun 2010 lalu, konflik yang terus meningkat mendorong Barrick Gold selaku pemegang saham terbesar Acacia sepakat untuk ikut serta sebagai fasilitator dalam negosiasi mengenai larangan ekspor konsentrat dengan pemerintah Tanzania, karena secara langsung maupun tidak langsung perusahaan Barrick juga terkena dampaknya. (*Reuters* 2017)

Kesepakatan perlu dilakukan karena harga saham perusahaan Acacia Mining terus menurun selama berbulan-bulan akibat ketidaksepakatan yang meningkat dengan pemerintah Tanzania. Kebijakan larangan ekspor terhadap perusahaannya akan menurunkan kemampuannya dalam melakukan bisnis di masa mendatang, terlebih di Tanzania karena mencakup 50% dari produksinya. Terdapat beberapa syarat dari pemerintah Tanzania dalam negosiasi tersebut yang membuat Acacia Mining tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses perjanjian penyelesaian sengketa. Pihak Barrick Gold dan pemerintah Tanzania secara resmi telah memulai negosiasi untuk mengarah pada penyelesaian sengketa yang terjadi yang melibatkan Acacia Mining.

Hingga pada tahun 2019, kedua belah pihak, yakni perusahaan Barrick Gold dan pemerintah Tanzania telah sampai pada proposal kesepakatan yang mengakhiri sengketa pajak berkepanjangan antara Tanzania dan Acacia Mining. Perjanjian telah diajukan ke Jaksa Agung Tanzania untuk meminta peninjauan dan pengesahan dan pastinya dengan persetujuan Acacia. Perusahaan tambang Acacia Mining diambil alih kembali oleh Barrick Gold senilai 1,2 miliar USD dan telah disetujui oleh Pengadilan Tinggi di Inggris dan Wales. Dalam kesepakatan tersebut, Barrick Gold menyetujui pembayaran sejumlah 300 juta USD kepada pemerintah Tanzania untuk menyelesaikan seluruh perselisihan dan sengketa pajak serta pencabutan

larangan ekspor konsentrat yang terjadi. Pemerintah Tanzania akan mendapatkan kepemilikan 16 persen dari masing-masing wilayah tambang yang sebelumnya dioperasikan Acacia Mining dan mendapatkan manfaat ekonomi dalam bentuk royalti, biaya kliring, dan partisipasi dalam distribusi di masa depan dengan basis 50:50 yang akan dilakukan oleh perusahaan baru dalam mengoperasikan tambang-tambang di Tanzania yang sebelumnya dioperasikan Acacia, yakni Twiga Minerals. (Reuters 2019)

Hubungan buruk yang telah terjalin sejak lama antara pemerintah Tanzania dan perusahaan tambang Acacia Mining membuat perusahaan sudah tidak bisa melanjutkan operasionalnya sebagai perusahaan publik yang independen di Tanzania dengan seluruh nilainya yang dipresentasikan oleh aset yang ada di negara tersebut. Sengketa pajak yang terjadi bertahun-tahun membuat pemerintah tidak siap berurusan langsung dengan Acacia. Oleh karena itu, setelah muncul kesepakatan, Barrick kembali mengambil alih kepemilikan Acacia Mining dan aktivitas pertambangan di wilayah tambang Tanzania akan dioperasikan oleh perusahaan tambang baru untuk memulai awal yang baik. (Barrick 2019)

Di bawah kesepakatan negosiasi yang dilakukan, karyawan Acacia Mining yang telah didakwa melakukan pencucian uang dan penggelapan dana mengaku bersalah atas penggelapan pajak. Namun telah dibebaskan dari penjara sekitar tahun 2020 dengan syarat membayar 1,5 miliar Shilling Tanzania atau setara dengan 649.632 USD sebagai kompensasi atas penggelapan pajak yang dilakukan. Jaksa Wankyo Simon yang menangani kasus tersebut menyatakan bahwa dakwaan lainnya dibatalkan. (Dausen and Reid 2020) Pasca penandatanganan perjanjian negosiasi, Januari 2020, pemerintah Tanzania secara resmi mencabut larangan

ekspor konsentrat mineral kepada perusahaan tambang asing dan telah mengambil 16% kepemilikan saham dari perusahaan Twiga Minerals. Sejumlah 1.600 kontainer yang ditimbun dari wilayah tambang Bulyanhulu dan Buzwagi sejak tahun 2017 kembali dilanjutkan untuk penjualan dan pendistribusian pada April 2020 dan menyerahkan 100 juta USD pertama dari kesepakatan kepada pemerintah.

(Dausen 2020)



BAB III

ANALISIS NEGOSIASI PEMERINTAH TANZANIA DAN PERUSAHAAN ACACIA MINING

Negosiasi ulang terkait reformasi kebijakan pertambangan tahun 2017 ditawarkan oleh pemerintah Tanzania bagi perusahaan multinasional asing yang terlibat konflik, namun tetap sesuai dengan persyaratan yang diberikan Tanzania. Berdasarkan pada teori *Bargaining Power* yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis upaya negosiasi antara pemerintah Tanzania dan perusahaan multinasional Acacia Mining. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi suatu aktor dalam mengukur *bargaining power* atau daya tawar menawar yang dimiliki dalam melakukan negosiasi. Kekuatan tawar menawar negara berkembang tuan rumah bergantung pada faktor sumber daya ekonomi, kebutuhan investasi asing langsung dalam pembangunan negara, dan otoritas berdaulat atau kekuasaan pemerintah untuk mengubah undang-undang di wilayah domestiknya. Sedangkan kekuatan tawar menawar investor asing atau perusahaan multinasional bergantung pada sumber daya ekonomi, motivasi perusahaan melakukan investasi di negara tuan rumah, dan bantuan hukum atau intervensi diplomatik yang diperoleh. (Abbott 1975)

3.1. *Bargaining Power* Tanzania

3.1.1 Sumber Daya Ekonomi

Faktor pertama yang mempengaruhi posisi tawar menawar negara tuan rumah adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki negara tersebut. Semakin berharga sumber daya yang dimiliki negara dan semakin besar kontrol negara

terhadap sumber dayanya, maka akan semakin kuat posisi tawar menawar negara terhadap perusahaan asing.

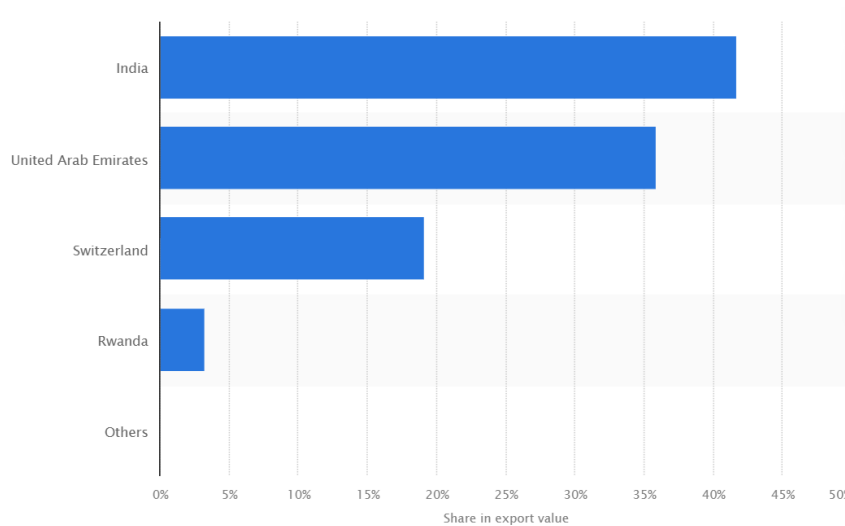
Menempati posisi keempat penghasil emas terbesar di kawasan Afrika, emas di Tanzania telah menjadi mineral utama yang diekstraksi, tergambar dengan cadangan yang dimiliki hingga tahun 2022 adalah sekitar 45 juta ons dan produksinya mencapai 50 ton per tahun. Permintaan emas Tanzania di pasar konsumen mengalami peningkatan bahkan selama pandemi berlangsung dikarenakan emas dapat digunakan sebagai aset yang aman (*safe haven*). Akhir-akhir ini, STAMICO mulai memurnikan emas dengan standar internasional (24 karat atau mencapai 99%) agar Bank Sentral negara dapat membeli emas murni sebagai cadangan devisanya. Hal tersebut akan memberikan tanda orisinalitas emas dari Tanzania dan dapat mempromosikan produksi negara ini di pasar global. (Mirondo 2021)

Tanzania memiliki 6 tambang emas skala besar di wilayah Danau Victoria yang menyimpan sekitar 90% cadangan emas negara (*The Citizen* 2021). Akses menuju wilayah tersebut cukup mudah, beberapa proyek pertambangan dapat diakses melalui jalur laut dengan kapal feri menuju teluk, maupun jalur darat melalui jalan nasional dan regional yang dipelihara dengan baik. Begitu juga dengan infrastruktur yang diperlukan untuk operasi pertambangan telah tersedia di lokasi, seperti fasilitas tailing, PLTA, dan jaringan listrik. (TRX Gold Corporation n.d.) Oleh karena itu, emas yang dimiliki Tanzania mampu menarik perhatian perusahaan dan investor asing untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya Tanzania dan menjalankan operasionalnya di negara tuan rumah tersebut.

Di sisi lain, lokasi geografis negara Tanzania yang strategis karena menjadi gerbang utama bagi perusahaan asing untuk memperluas bisnisnya ke negara-negara Afrika lain. Hal ini disebabkan oleh Tanzania yang berbatasan langsung dengan 6 negara *landlocked*, yaitu Uganda, Kongo, Zambia, Malawi, Rwanda, dan Burundi. Terlebih, Tanzania memiliki 3 pelabuhan utama yang menjadi pusat perdagangan internasional, yakni Dar es Salaam, Tanga, dan Mtwara. (TIC 2015) Aktivitas perdagangan negara *landlocked* yang berbatasan dengan Tanzania dapat dilayani dan dihubungkan melalui pelabuhan-pelabuhan besar tersebut, pengirimannya tidak hanya terbatas pada kawasan Afrika saja, tetapi lebih luas ke kawasan Eropa, Amerika, Australia, bahkan Asia. Dengan situasi tersebut investor asing akan mempertimbangkan modal yang dikeluarkan untuk investasi dan mendapatkan pasokan sumber daya. Tanzania terhubung dengan lautan dan memiliki pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan global yang melayani perdagangan negara *landlocked* di sekitarnya. Sehingga aktivitas distribusi perusahaan lebih mudah dan murah jika melewati Tanzania.

Tanzania berhasil keluar secara resmi dari status negara berpenghasilan rendah (LIC) ke negara berpenghasilan menengah ke bawah (LMIC) pada tahun 2020. Pencapaian tersebut menggambarkan stabilitas ekonomi negara yang berkelanjutan dengan dukungan terhadap kekayaan alam untuk pembangunan. Mitra dagang utama dari Tanzania diantaranya adalah negara China, India, Uni Eropa, Kenya, Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Sementara negara tujuan utama ekspor emas Tanzania di tahun 2019 adalah India sebesar 42% dan Uni Emirat Arab sebesar 36%. (Kamer 2022)

Grafik 3. Negara Tujuan Ekspor Emas Tanzania Tahun 2019



Sumber: Statista 2022

Kekayaan emas yang dimiliki Tanzania mampu meningkatkan posisi *bargaining power* dari negara tuan rumah ini karena dapat menarik perhatian investor asing untuk berinvestasi di Tanzania. Selain itu, letak geografis negara strategis dan aksesnya terhadap sumber daya mudah. Mitra dagang dan negara tujuan ekspor sumber daya Tanzania sebagian besar adalah negara maju yang mana akan mempengaruhi nilai atau persentase ekspor negara Tanzania. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintahan John Magufuli mampu mengontrol kekayaan Tanzania dengan prinsip kepemimpinan yang dijalankannya, baik sumber daya yang dikelola secara langsung oleh negaranya sendiri maupun yang dikelola oleh perusahaan asing. Situasi ini akan memperkuat posisi tawar menawar Tanzania terhadap Acacia Mining dalam negosiasi yang dijalankan.

3.1.2 Kebutuhan Pembangunan Negara terhadap Investor Asing

Faktor kedua adalah mengenai kebutuhan pembangunan negara berkembang tuan rumah dan bagaimana nilai atau pengaruh FDI dalam pembangunannya. Posisi tawar menawar negara akan dinilai berdasarkan

pandangannya terhadap peran investor asing di negaranya, apakah positif sehingga negara berusaha untuk menarik lebih banyak investor asing dan menawarkan persyaratan investasi yang menarik serta tidak terlalu menuntut, ataukah negatif dengan tidak begitu peduli pada kehadiran investor asing. *Bargaining Power* negara akan lebih kuat jika memiliki pandangan yang negatif kepada FDI karena mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam negaranya tanpa bantuan investor asing.

Pandangan Tanzania terhadap investor asing pada masa awal kemerdekaan di bawah kepemimpinan Mwalimu Julius Nyerere terbelah negatif dengan menganggap FDI kapitalistik dan eksploitatif (M. I. Muhanga 2016). Sehingga investor asing tidak dapat memiliki akses untuk beroperasi di Tanzania. Reformasi ekonomi tahun 1980 an mengubah pandangan Tanzania terhadap FDI. Ditambah dengan dorongan dari Bank Dunia bagi seluruh negara di Afrika untuk lebih meningkatkan sektor pertambangan dan membuka akses bagi perusahaan multinasional dan investor asing, Di sisi lain, kegiatan penambangan lokal skala kecil (ASM) pada saat itu terhambat karena rendahnya tingkat teknologi dan pemahaman terkait sektor ekstraksi.

Akses bagi investor asing semakin terbuka luas, implementasi dari kebijakan atau undang-undang terkait industri pertambangan yang baru pertama kali dikeluarkan sekitar tahun 1990. Dari hal tersebut, Tanzania dapat meraih keuntungan melalui pemberlakuan pajak dan insentif lainnya yang mengarah kepada pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi negara. Setelah bertahun-tahun perusahaan multinasional dan investor asing hadir di Tanzania, dengan segala tantangan yang muncul yang melibatkan masyarakat lokal bahkan

pemerintah, Tanzania tidak menutup akses bagi investor asing dan tetap menawarkan peluang yang signifikan kepada pihak swasta tersebut. Hal ini sejalan dengan ambisi Tanzania untuk meningkatkan perekonomian negara yang tercantum dalam visi Pembangunan Tanzania 2025. Terbukti juga dengan kehadiran dan pertumbuhan FDI di Tanzania mampu berkontribusi pada PDB dan pembangunan negaranya. (Magoma 2019)

Akan tetapi, pandangan Tanzania terhadap perusahaan tambang asing Acacia Mining setelah kepemimpinan Presiden John Magufuli tampak berbeda dengan FDI lainnya. Hubungan yang rumit antara kedua aktor ini telah berlangsung cukup lama akibat berbagai permasalahan yang muncul yang diduga disebabkan oleh perusahaan Acacia Mining. Pemerintah Tanzania mulai menganggap eksistensi investor asing ini secara operasionalnya telah membawa dampak negatif bagi masyarakat lokal dan negara, seperti terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, pencemaran lingkungan, korupsi, hingga sengketa pajak. Menanggapi konflik yang terjadi, pemerintah melakukan reformasi kebijakan dan mengesahkan beberapa undang-undang baru yang bersifat restriktif dan membatasi aktivitas pertambangan pada tahun 2017. Terdapat perubahan persyaratan investasi yang menjadi lebih ketat dan tidak semudah sebelumnya, serta larangan aktivitas ekspor untuk emas dan konsentrat tembaga yang pastinya menghambat perkembangan dan operasional perusahaan.

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah Tanzania memiliki pandangan yang negatif terhadap pihak investor asing yang dianggap penipu dan menyebabkan konflik di Tanzania, dalam hal ini adalah Acacia Mining. Amandemen kebijakan pertambangan di tahun 2017 dapat menjadi satu bukti

bahwa pemerintah tidak membutuhkan investasi dari Acacia Mining. Di sisi lain, sektor pertambangan Tanzania tidak hanya bergantung pada investasi Acacia Mining, masih banyak perusahaan tambang lokal dan asing yang dapat mengelola wilayah tambang dan menopang perekonomian nasional negara. Salah satunya adalah AngloGold Ashanti, perusahaan asal Afrika Selatan yang mengelola tambang Geita di Tanzania. Menjadi salah satu produsen emas terbesar di Tanzania, AngloGold Ashanti menunjukkan komitmen investasi jangka panjangnya di Tanzania (*African Mining Market 2022*). Maka dari itu, pemerintah merasa tidak perlu mempertahankan iklim investasi yang menarik bagi Acacia Mining. Hingga Magufuli mendeklarasikan perang ekonomi kepada perusahaan Acacia namun tetap menawarkan negosiasi ulang terkait kontrak. Lebih lanjut, pemerintah mengancam akan menghentikan operasi tambang apabila perusahaan Acacia tidak segera memulai negosiasi. Pihak perusahaan mencoba melakukan upaya negosiasi seperti yang ditawarkan oleh pemerintah Tanzania untuk dapat mencapai penyelesaian masalah.

Selama periode negosiasi berlangsung, Presiden Magufuli terlihat tidak terlalu peduli dengan keberlanjutan operasional perusahaan Acacia Mining di Tanzania. Dengan kata lain, tidak masalah apabila perusahaan tidak lagi berinvestasi di negaranya. Terdapat syarat yang diajukan oleh negara Tanzania dalam proses negosiasi, yakni perusahaan Acacia Mining tidak boleh berpartisipasi secara langsung dalam perjanjian penyelesaian sengketa. Penyebabnya adalah karena konflik yang terus bermunculan pengaruh dari operasional pertambangan pihak Acacia dan tak kunjung memperoleh kepastian, serta permasalahan dokumen dimana Acacia tidak memiliki sertifikat kepatuhan dari BRELA (*Business*

Registration and Licensing Agency) setelah berganti nama dari African Barrick Gold di tahun 2014 (*IPP Media* 2017). Hal tersebut membuat pemerintah sudah tidak ingin berhubungan lagi dengan Acacia Mining secara langsung. Sehingga proses negosiasi yang dilaksanakan melibatkan pihak ketiga, yakni Barrick Gold. Keterlibatan perusahaan secara langsung akan menimbulkan kemungkinan lain seperti perusahaan yang terus menyangkal menjadi penyebab konflik yang terjadi, maupun tidak mengakui tindakannya dalam penggelapan dana atau pajak dan korupsi selama melakukan penambangan. Sehingga perusahaan akan menolak membayar denda dengan jumlah yang ditentukan negara dan kerap meminta keringanan guna menjaga stabilitas operasional pertambangannya di Tanzania. Pandangan negatif Tanzania terhadap Acacia Mining dapat memperkuat posisi tawar menawar negara berkembang tuan rumah dalam negosiasi yang berlangsung.

3.1.3 Otoritas Berdaulat

Faktor selanjutnya adalah mengenai kekuasaan yang dimiliki pemerintah negara berkembang tuan rumah untuk memberlakukan atau mengubah undang-undang dalam wilayah domestiknya. Melalui perubahan kebijakan tersebut, negara mampu mengubah syarat-syarat perjanjian investasi dengan pihak perusahaan multinasional sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Tujuannya adalah untuk melindungi sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki.

Keberadaan perusahaan Acacia Mining dalam beberapa tahun terakhir dianggap membawa dampak buruk bagi pembangunan nasional Tanzania, terlebih dengan perselisihan yang terjadi dengan pemerintah dan masyarakat lokal. Sejalan dengan prinsip *resource nationalism* sebagai strategi politik dalam kepemimpinan Magufuli yang digunakan untuk melindungi sumber daya mendorong Presiden

mendeklarasikan klaim kedaulatannya atas sumber daya alam negaranya dan mengesahkan utamanya tiga undang-undang baru di tahun 2017, yakni *Natural Wealth and Resources Act 2017*, *Natural Wealth and Resources Contracts Act 2017*, dan *Written Laws Act 2017*. Fokus amandemen kebijakan tersebut adalah pada ketentuan peninjauan dan negosiasi kembali kontrak sumber daya yang ada, pembentukan komisi pertambangan yang mengendalikan kontrak dan aktivitas pertambangan, serta memajukan pemanfaatan dan pengadaan barang lokal. Dengan kebijakan baru ini, negara akan mendapatkan hak hingga 50% kepemilikan setiap aset pertambangan investor asing dan memiliki hak bebas tidak kurang dari 16% dalam satu proyek pertambangan. (M. Muhanga 2019) Pada tahun yang sama, Presiden Magufuli membentuk dua Komite Kepresidenan Tanzania yang difokuskan untuk menyelidiki tuduhan penipuan kepada Acacia Mining. Kemudian mengarahkan otoritas seperti Biro Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki lebih lanjut para pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut, hingga meminta perusahaan untuk membayar royalti dari tunggakan pajak yang belum dibayarkan selama belasan tahun.

Dalam konsep *bargaining power*, upaya reformasi kebijakan oleh pemerintah Tanzania dalam sektor sumber daya ekstraksi dilakukan karena negara tuan rumah memiliki kekuasaan di lingkup domestiknya. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kontrol negara dan pendapatan yang dihasilkan dari ekstraksi sumber daya dalam wilayah nasional Tanzania. Kebijakan tegas kerap dikeluarkan pemerintah dalam mendorong pihak Acacia Mining melakukan negosiasi ulang terkait kontrak perjanjian, namun tetap sesuai dengan syarat yang diajukan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa otoritas berdaulat yang dimiliki Tanzania

akan meningkatkan posisi tawar menawar negara berkembang tuan rumah ini dalam proses negosiasi dengan perusahaan.

3.2. Bargaining Power Acacia Mining

3.2.1 Sumber Daya Ekonomi

Faktor pertama yang mempengaruhi posisi tawar menawar *Foreign Direct Investment* adalah sumber daya ekonomi yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Ada empat sumber daya ekonomi terbesar yang berkaitan dengan perusahaan multinasional, yakni modal investasi, teknologi, keahlian manajerial, dan pasar internasional. Posisi tawar menawar aktor FDI akan bergantung pada tingkat kontrol perusahaan asing yang dapat dipertahankan atas sumber daya yang dieksplorasi dan kepentingannya bagi negara berkembang tuan rumah.

Acacia Mining telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional Tanzania, mencakup royalti, pajak, gaji karyawan, pembelian kepada pemasok dan kontraktor lokal, serta penanaman modal atau investasi pada komunitas lokal Tanzania. Total investasi modal perusahaan ini selama kurang lebih 15 tahun terakhir di Tanzania telah mencapai 4 miliar USD. (Acacia Mining Report 2019) Laporan independen oleh Ernst and Young (EY) yang berjudul “*Acacia Mining plc Total Economic and Tax Contribution*” menyebutkan bahwa selama tahun 2017 perusahaan ini telah menyumbang sebesar 712 juta USD untuk perekonomian Tanzania atau setara dengan 1,5% dari PDB negara tersebut melalui tiga tambang yang dikelolanya (Solomons 2018).

Saat proses negosiasi berlangsung antara Tanzania dan Barrick Gold tahun 2018, Acacia Mining berhasil membuat bisnisnya lebih stabil setelah penurunan nilai saham yang dihadapi sebelumnya dengan berfokus pada kinerja operasional di tiga wilayah tambangnya. Perusahaan mampu menghasilkan produksi emas sebesar 521.980 ons selama tahun 2018. Komitmen jangka panjang Acacia Mining terhadap Tanzania dibuktikan dengan memberikan kontribusi pajak dan royalti mencapai lebih dari 127 juta USD, pembelian kebutuhan operasional dari pemasok lokal di Tanzania hingga mencapai 273 juta USD, mempertahankan jumlah karyawan perusahaan dari masyarakat lokal mencapai 96,2 persen, serta melanjutkan investasi senilai 8,8 juta USD untuk meningkatkan kualitas hidup warga lokal yang tinggal di dekat lokasi tambang Acacia Mining. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari implementasi Strategi Komunitas Berkelanjutan perusahaan dan untuk menunjukkan dukungannya terhadap Visi Pembangunan Tanzania 2023 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. (Acacia Mining Report 2019)

Modal investasi swasta bagi perusahaan asing ini adalah sumber daya yang perlu dipertimbangkan. Untuk itu, Acacia Mining tetap menanamkan modal untuk proyek investasi di negara Tanzania, seperti investasi senilai 2 juta USD pada Pusat Kesehatan Bugarama di wilayah tambang Bulyanhulu, kontribusi pada pembangunan pipa air dari Danau Victoria ke penduduk sekitar, pengembangan Pusat Kesehatan Nyamwaga di wilayah tambang Mara Utara, serta implementasi proyek pertanian senilai 1,1 juta USD di wilayah tambang Buzwagi. (Acacia Mining Report 2019) Dari aspek pasar internasional, Acacia Mining memiliki kebijakan dalam penjualan produksi emasnya dengan harga pasar yang berlaku.

Dipengaruhi oleh berbagai faktor industri dan ekonomi makro membuat pergerakan harga emas yang fluktuatif dalam waktu yang singkat. Maka dari itu, dengan lingkungan operasional yang semakin menantang akibat perselisihan dengan pemerintah, perusahaan berupaya melakukan lindung nilai produksi emas sebesar 170.000 ons di tahun 2018 guna mencegah risiko penurunan.

Akan tetapi, dalam aspek teknologi, perusahaan Acacia Mining Mining tidak dapat menanganinya dengan baik. Fasilitas penyimpanan tailing tambang di perusahaannya mengalami kegagalan, sehingga menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan akibat zat berbahaya yang tersebar. Hal ini membuat perusahaan dituntut dan dikenakan denda sebesar 300 juta TZS oleh pemerintah. Maka dari itu, terdapat dua pandangan dari aspek keahlian manajerial Acacia Mining terhadap anak perusahaan yang dikelolanya ini. Di satu sisi, perusahaan berhasil melakukan koordinasi dengan tiga tambangnya untuk mencapai target produksi emas yang diinginkan. Di sisi lain, perusahaan tidak mampu mengelola teknologi untuk operasional tambang di tiap wilayahnya dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan dan memicu perselisihan dengan masyarakat juga pemerintah.

Berdasarkan konsep *bargaining power*, selama proses negosiasi Acacia Mining telah meningkatkan posisi tawar menawarnya dengan menunjukkan kontrol atas sumber daya di Tanzania yang dikelola oleh pertambangannya. Dalam hal ini, produksi emas tahun 2018 lebih banyak, hampir 100.000 ons, dari target yang ditentukan. Ditambah dengan investasi yang masih dilanjutkan untuk proyek pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta kebijakan penjualan emasnya di pasar internasional yang mampu mencegah risiko penurunan.

Tetapi di samping itu, posisi tawar menawar perusahaan atas Tanzania cenderung lemah karena ketidakmampuannya dalam mengelola teknologi dan mengawasi operasional anak perusahaan yang dimiliki.

3.2.2 Motivasi Perusahaan

Faktor kedua adalah motivasi atau alasan yang dimiliki perusahaan asing untuk berinvestasi di negara berkembang tuan rumah. Jika perusahaan memiliki alasan yang kuat maka akan menerima persyaratan investasi yang diberikan atau ditawarkan oleh negara tuan rumah. Acacia Mining didirikan pada tahun 2000 di Tanzania sebagai unit dari perusahaan Barrick Gold yang sudah lebih awal terlibat dalam sektor tambang Tanzania. Kepentingan perusahaan ini di Tanzania adalah sektor pertambangan, utamanya adalah emas. Acacia Mining memprioritaskan kegiatan ekstraksinya di Tanzania melalui tiga wilayah tambang yang dikelolanya. (Plakhov and Jaffer 2018)

Motivasi perusahaan Acacia Mining memilih Tanzania sebagai negara tujuan investasi selain karena cadangan emas dan kekayaan alam yang berlimpah, Tanzania adalah negara dengan lokasi yang strategis untuk mendistribusikan ekstraksi sumber daya yang dihasilkan melalui ekspor. Terlebih negara ini berbatasan langsung dengan beberapa negara *landlocked* di Afrika. Saat Tanzania masih dikategorikan sebagai negara miskin, perusahaan menargetkan Tanzania menjadi negara tujuan agar dapat menjamin pasokan sumber daya yang dibutuhkan, namun dengan modal yang cenderung lebih murah. Reformasi ekonomi pada tahun 1980 juga mempengaruhi alasan perusahaan, dikarenakan terbukanya akses bagi FDI untuk beroperasi di Tanzania dengan persyaratan investasi yang menguntungkan. Secara geologis, Tanzania adalah peluang terbaik untuk

mendapatkan penemuan baru dalam perkembangan bisnis Acacia Mining. Pilar utama yang menjadi dasar keberlanjutan investasi Acacia Mining di Tanzania di masa depan adalah bisnis, manusia, dan hubungan. (*Bloomberg.com* 2017)

Jika dilihat pada aspek ini, posisi tawar menawar Acacia Mining terhadap Tanzania akan melemah dalam proses negosiasi. Motivasi perusahaan yang kuat untuk melanjutkan investasinya di Tanzania akan mengarah pada kesediaan perusahaan mengikuti persyaratan investasi yang diajukan Tanzania sebagai negara tujuan investasi. Menilai alasan perusahaan asing tersebut, pemerintah dapat mengajukan persyaratan yang menuntut dengan otoritas yang dimiliki. Sebaliknya, persyaratan investasi akan menguntungkan Tanzania guna mencapai kepentingan nasionalnya.

3.2.3 Bantuan Hukum atau Intervensi Diplomatik

Faktor berikutnya adalah mencari alternatif lain melalui bantuan hukum atau intervensi diplomatik oleh FDI apabila negara tuan rumah memutuskan untuk mengubah persyaratan perjanjian investasi atau hukum domestiknya dan bermaksud mengambil alih properti investor asing terkait. Pada situasi tersebut, perusahaan multinasional berhak mencari alternatif lain seperti mengandalkan hukum internasional dan mencari penegakan di arbitrase internasional ataupun meminta intervensi diplomatik kepada pemerintah negara asalnya.

Pelarangan ekspor emas oleh Tanzania bagi Acacia Mining membuat perusahaan menghadapi tantangan besar dengan nilai saham yang terus menurun, penimbunan sejumlah emas di wilayah tambangnya, hingga terkena tagihan pajak mencapai ratusan miliar dolar. Acacia Mining mencoba upaya alternatif di tahun 2017 dengan memulai arbitrase internasional atas nama dua tambangnya, yakni

Bulyanhulu dan Buzwagi, melawan Tanzania setelah negara tuan rumah ini memaksa negosiasi ulang kontrak perjanjian investasi. Arbitrase internasional ini dilakukan dengan tujuan melindungi hak dan kepentingan setiap pihak yang terlibat hingga mencapai penyelesaian sengketa. Sebelum proses arbitrase dilanjutkan, Barrick Gold selaku pemegang saham mayoritas Acacia Mining telah turut serta dalam diskusi penyelesaian sengketa dengan Tanzania. Intervensi Barrick Gold ini juga didorong oleh syarat yang diajukan Tanzania untuk tidak melibatkan Acacia Mining secara langsung dalam negosiasi tersebut.

Pada tahun 2018, saat proses negosiasi masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan seutuhnya, Acacia Mining mengancam negara tuan rumah akan menggunakan Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) antara Tanzania dan Inggris agar segera mencapai penyelesaian. (Sloane 2020) Namun ancaman itu tidak pernah terwujud hingga di tahun 2019 Barrick Gold dan Tanzania berhasil menyelesaikan perselisihan dengan beberapa perjanjian investasi yang ditinjau ulang. Diantaranya adalah pembayaran denda oleh perusahaan, pemberian sejumlah kepemilikan properti masing-masing tambang yang dioperasikan Acacia Mining, serta partisipasi negara dalam operasional tambang. Kepemilikan perusahaan Acacia Mining diambil alih kembali oleh Barrick Gold dan operasionalnya akan dikelola oleh perusahaan patungan baru antara Barrick Gold dan pemerintah Tanzania (Twiga Minerals) untuk bisa mencabut larangan ekspor yang berlaku. (Reuters 2019)

Meskipun Acacia Mining memiliki alternatif untuk meningkatkan *bargaining power* terhadap Tanzania dengan bantuan hukum maupun intervensi diplomatik, perusahaan akan tetap berada pada posisi yang relatif tidak

menguntungkan. Penyebabnya adalah otoritas yang dimiliki negara tuan rumah terlalu kuat dalam mengubah hukum domestiknya. Di samping itu, pemerintah telah membuktikan tindakan negatif perusahaan Acacia Mining dalam penambangannya. Dapat disimpulkan bahwa posisi Acacia Mining terhadap Tanzania melemah dalam negosiasi penyelesaian sengketa ini. Terbukti dengan hasil akhir kesepakatan investasi dengan Acacia Mining yang berhenti beroperasi di Tanzania dan digantikan oleh perusahaan lain.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Proses negosiasi untuk penyelesaian konflik antara pemerintah Tanzania dan Acacia Mining berlangsung kurang lebih selama 2 tahun hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Pemerintah Tanzania tidak mengizinkan Acacia Mining untuk terlibat langsung dalam negosiasi. Sehingga Barrick Gold mengajukan diri untuk menjadi fasilitator dan pihak ketiga yang mewakili Acacia Mining dalam memperoleh perjanjian dengan pemerintah. Menurut teori *Bargaining Power* oleh Frederick Abbott, beberapa faktor dapat mempengaruhi posisi tawar menawar suatu pihak dalam proses negosiasi. Posisi negara tuan rumah dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi, kebutuhan negara terhadap FDI, dan otoritas berdaulat. Sedangkan posisi investor asing dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi, motivasi perusahaan, dan bantuan hukum.

Dari sudut pandang negara berkembang tuan rumah dalam aspek sumber daya ekonomi, Tanzania memiliki cadangan emas yang berlimpah yang menarik perusahaan multinasional untuk berinvestasi. Ditambah dengan lokasi geografis negara yang strategis di kawasan Afrika membuat perusahaan memiliki potensi untuk ekspansi bisnisnya. Pada aspek kebutuhan pembangunan negara terhadap FDI, Tanzania memiliki pandangan yang positif kepada FDI secara keseluruhan namun tidak terhadap Acacia Mining. Pemerintah memiliki pandangan negatif dan tidak peduli dengan keberlanjutan operasional perusahaan Acacia bahkan mengancam akan menutup tambangnya jika tidak segera memulai negosiasi. Hal ini juga dibuktikan dengan kebijakan baru sektor tambang yang bersifat restriktif

dan membatasi aktivitas tambang perusahaan. Selanjutnya pada aspek otoritas berdaulat, Tanzania memiliki kekuasaan untuk mengubah kebijakan pertambangan dengan tujuan melindungi sumber daya yang dimiliki dari eksploitasi perusahaan terkait. Ketiga aspek di atas akan memperkuat posisi Tanzania terhadap Acacia Mining dalam negosiasi.

Di sisi lain, dari sudut pandang investor asing dalam aspek sumber daya ekonomi, Acacia Mining memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian nasional Tanzania. Selama proses negosiasi, Acacia Mining mampu membuktikan komitmen jangka panjangnya terhadap negara tuan rumah melalui kontrolnya dalam produksi sumber daya ekstraksi (emas), melindungi nilai produksi emas di pasar internasional, pembelian kebutuhan operasional tambang dari pemasok lokal, dan membiayai proyek investasi komunitas lokal di Tanzania. Tetapi tidak berhasil dalam mengelola teknologi dan operasional anak perusahaan yang dimiliki sehingga memicu permasalahan. Kemudian dalam aspek motivasi perusahaan, Acacia Mining memiliki alasan yang kuat untuk berinvestasi di Tanzania karena beberapa faktor yang menguntungkan untuk bisnisnya.

Selanjutnya dalam aspek bantuan hukum atau intervensi diplomatik, Acacia Mining tidak mendapatkan bantuan hukum dari arbitrase internasional maupun perjanjian investasi bilateral antara Tanzania dan Inggris. Dikarenakan pemerintah Tanzania sudah menegaskan tidak menginginkan keterlibatan Acacia secara langsung dan Barrick Gold sudah lebih dulu melakukan intervensi dalam negosiasi yang berlangsung sebagai pihak ketiga. Dengan kata lain, Acacia Mining hanya mendapatkan bantuan dari perusahaan induknya. Meskipun alternatif berhasil dilakukan Acacia, perusahaan ini akan berada pada posisi yang relatif tidak

menguntungkan sebab pemerintah sudah membuktikan tindakan negatif selama kegiatan tambangnya berlangsung di Tanzania. Berdasarkan ketiga aspek di atas, posisi bargaining power Acacia Mining adalah lebih rendah dan lemah dibandingkan pemerintah Tanzania dalam negosiasi penyelesaian sengketa.

Hasil akhir dari negosiasi ini membuktikan bahwa posisi tawar menawar pemerintah Tanzania adalah lebih kuat dibandingkan perusahaan Acacia Mining. Dengan kata lain, kedua pihak berhasil mencapai kesepakatan dan mengakhiri sengketa pajak, dengan pemerintah yang mampu mengubah kondisi investasi yang diterima perusahaan Acacia Mining. Pemerintah berhasil membuat perusahaan setuju untuk membayar denda sejumlah yang telah disepakati, mendapatkan kepemilikan 16% dari tiap wilayah tambang yang dioperasikan Acacia, serta memiliki hak partisipasi dengan basis 50:50 melalui perusahaan baru, kolaborasi antara Tanzania dan Barrick Gold, menggantikan eksistensi Acacia Mining.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang tertera, tentunya penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum sempurna. Penelitian ini masih terbatas pada hubungan antara pemerintah Tanzania dan pihak perusahaan Acacia Mining. Akan lebih menarik apabila menganalisis bagaimana pengaruh dari aktor lain dalam negosiasi seperti negara asal perusahaan atau mitra dagang utama Tanzania. Penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis bagaimana keberlanjutan hubungan pemerintah Tanzania dengan Barrick Gold dan perusahaan baru pengganti Acacia Mining setelah tahun 2020, karena masih ada negosiasi yang berlangsung terkait ratifikasi dan implementasi perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Frederick M. 1975. "Bargaining Power and Strategy in the Foreign Investment Process: A Current Andean Code Analysis." *Syracuse Journal of International Law and Commerce* 3: 319.
- Acacia, Mining. 2019. "A Stronger Future Together." Annual Report 2018. https://www.miningnewsfeed.com/reports/annual/AcaciaMining_AR_2018.pdf.
- "African Barrick Gold lawsuit (re Tanzania)." 2013. Business & Human Rights Resource Centre. 2013. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/african-barrick-gold-lawsuit-re-tanzania/>.
- Ahearne, Rob. 2017. "Tanzania at 56: Echoes of the Best and Worst of Nyerere under Magufuli." *The Conversation*. 2017. <http://theconversation.com/tanzania-at-56-echoes-of-the-best-and-worst-of-nyerere-under-magufuli-88812>.
- "AngloGold Ashanti Shows Commitment to Long-Term Investment in Tanzania | African Mining Market." 2022. *African Mining Market* (blog). May 25, 2022. <https://africanminingmarket.com/anglogold-ashanti-shows-long-term-commitment-to-investing-in-tanzania/13306/>.
- Bamwenda, Emilia. 2018. "The Symptoms of the Shift Towards an Authoritarian State in Tanzania's President John Pombe Magufuli's Rule." *Politeja* 56: 123–50.
- Bloomberg.com*. 2017. "ACACIA MINING PLC: Market Update," June 2, 2017. <https://www.bloomberg.com/press-releases/2017-06-02/acacia-mining-plc-market-update>.
- . 2018. "ACACIA MINING PLC: Fourth Quarter Production Report to 31 Dec 2017," January 15, 2018. <https://www.bloomberg.com/press-releases/2018-01-15/acacia-mining-plc-fourth-quarter-production-report-to-31-dec-2017>.
- Butler, Paula. 2004. "Tanzania: Liberalisation of Investment and the Mining Sector Analysis of the Content and Certain Implications of the Tanzania 1998 Mining Act." *Regulating Mining in Africa: For Whose Benefit?*, January.
- Casey, J. P. 2019. "Tanzania fines Acacia \$2.4m over environmental damage." *Mining Technology* (blog). May 20, 2019. <https://www.mining-technology.com/news/tanzania-fines-acacia-2-4m-over-environmental-damage/>.
- Center (TIC), Tanzania Investment. 2015. "Why Invest in Tanzania an Overview of Investment Climate, Opportunities, Trends & Services Provided by Tanzania Investment Centre." <http://repository.businessinsightz.org/handle/20.500.12018/2888>.
- Cole, Samantha. 2017. "Acacia Mining CEO finally admits in public: '..... CRITICS MAY HAVE A VALID POINT.'" *Tanzania Business Ethics* (blog). February 10, 2017. <https://tanzaniabusinessethics.wordpress.com/2017/02/10/acacia-mining-ceo-finally-admits/>.
- Curtis, Mark, and Tundu Lissu. 2008. "A Golden Opportunity: How Tanzania Is Failing to Benefit from Gold Mining." Curtis Research. October 1, 2008. <https://curtisresearch.org/a-golden-opportunity-how-tanzania-is-failing-to>

- benefit-from-gold-mining/.
- Dausen, Nuzulack. 2020. "Barrick Pays Tanzania Initial \$100 Million after Gold Shipments Resume." *Reuters*, May 25, 2020, sec. Commodities News. <https://www.reuters.com/article/us-tanzania-mining-barrick-gold-idUSKBN23110W>.
- Dausen, Nuzulack, and Helen Reid. 2020. "Acacia Mining Employees Pay Tanzania \$650,000 in Tax Evasion Case | Reuters." 2020. <https://www.reuters.com/article/us-tanzania-mining/acacia-mining-employees-pay-tanzania-650000-in-tax-evasion-case-idUSKBN23O29Y>.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. 2011. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE.
- Dzimwasha, Taku. 2017. "Tanzania: Magufuli's High-Stakes Gamble." *African Business*. August 3, 2017. <https://african.business/2017/08/economy/tanzania-magufulis-high-stakes-gamble/>.
- "Further Update Concerning Acacia Mining Plc – Situation in Tanzania and Review of Acacia Mine Plans." 2019. Barrick Gold Corporation. https://s25.q4cdn.com/322814910/files/doc_downloads/acacia/Further-Update-Concerning-Acacia-Mining-plc-%E2%80%93-Situation-in-Tanzania-and-Review-of-Acacia-Mine-Plans.pdf.
- "Human Rights Violations Under Private Control: Acacia Mining's Grievance Mechanism and the Denial of Rights." 2019. RAID. https://www.raid-uk.org/sites/default/files/raid_report_on_private_grievance_mechanisms_final_12_june_2019.pdf.
- Jacob, Thabit, and Rasmus Hundsbæk Pedersen. 2018. "New Resource Nationalism? Continuity and Change in Tanzania's Extractive Industries." *The Extractive Industries and Society* 5 (2): 287–92. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.02.001>.
- Jamasmie, Cecilia. 2017. "Acacia Mining Now Hit with \$190 Billion Tax Bill in Tanzania." *MINING.COM* (blog). July 24, 2017. <https://www.mining.com/acacia-mining-now-hit-190-billion-tax-bill-tanzania/>.
- . 2018. "Tanzania Anti-Corruption Body Charges Acacia Subsidiaries with Tax Evasion, Money Laundering." *MINING.COM* (blog). October 17, 2018. <https://www.mining.com/tanzania-anti-corruption-body-arrests-acacia-mining-employees/>.
- Kamer, Lars. 2022. "Tanzania: main destinations for gold exports." Statista. 2022. <https://www.statista.com/statistics/1294036/distribution-of-gold-exports-in-tanzania-by-destination/>.
- Kapdi, Dentons-Noor, and Robert Parring. 2018. "Amendments to the Mining Act in Tanzania." Lexology. February 14, 2018. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f26f7200-ee53-4271-9560-2f9b64afb8d0>.
- Kinyondo, Abel, and Christopher Huggins. 2019. "Resource Nationalism in Tanzania: Implications for Artisanal and Small-Scale Mining." *The Extractive Industries and Society* 6 (1): 181–89. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.08.005>.

- Kwayu, Aikande Clement. 2021. "Tanzania's John Magufuli: a brilliant start but an ignominious end." *The Conversation*. March 18, 2021. <http://theconversation.com/tanzanias-john-magufuli-a-brilliant-start-but-an-ignominious-end-157092>.
- Momodu, Samuel. 2021. "John Pombe Joseph Magufuli (1959-2021) •." April 24, 2021. <https://www.blackpast.org/global-african-history/people-global-african-history/john-pombe-joseph-magufuli-1959/>.
- Lange, Siri. 2011. "Gold and Governance: Legal Injustices and Lost Opportunities in Tanzania." *African Affairs* 110 (439): 233–52. <https://doi.org/10.1093/afraf/adr003>.
- Lauwo, Sarah, Orthodoxia Kyriacou, and Olatunde Julius Otusanya. 2020. "When Sorry Is Not an Option: CSR Reporting and 'Face Work' in a Stigmatised Industry – A Case Study of Barrick (Acacia) Gold Mine in Tanzania." *Critical Perspectives on Accounting* 71 (September): 102099. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2019.102099>.
- Lugoe, Dr F N. 2010. "CONFLICTS ENDEMIC IN EXTRACTIVE INDUSTRIES," 22.
- Magoma, Suleiman Masegesa. 2019. "The Significant Role of Tanzania's Diplomacy towards Economic Development." <https://archives.kdischool.ac.kr/bitstream/11125/34174/1/The%20Significant%20role%20of%20Tanzania%27s%20diplomacy%20towards%20economic%20development.pdf>.
- "Magufuli Sidelines Acacia, Opens Talks with Barrick." 2017. June 17, 2017. <https://www.ippmedia.com/en/news/magufuli-sidelines-acacia-opens-talks-barrick>.
- Maliganya, Willy, and Kenneth Bengesi. 2018. "Policy Enabling Environment of Mining Sector in Tanzania: A Review of Opportunities and Challenges." *Journal of Sustainable Development* 11 (July): 1. <https://doi.org/10.5539/jsd.v11n4p1>.
- Mirondo, Rosemary. 2021. "Tanzania starts refining gold to international standards." *The Citizen*. May 3, 2021. <https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/business/tanzania-starts-refining-gold-to-international-standards-3385190>.
- Muhanga, Mikidadi. 2019. "An Examination of Some Key Issues on Legal and Policy Environment in the Mining Sector After the Economic Reforms in Tanzania." *International and Public Affairs* 3 (August): 33–42. <https://doi.org/10.11648/j.ipa.20190302.11>.
- . 2022. "Pre and Post Economic Reforms in the Governance of Mineral Resources: A Review of Mining Policies and Laws Since Independence in Tanzania," June.
- Muhanga, Mikidadi I. 2016. "Tanzania's Mining Sector Reforms: Towards or Away from Mwalimu Nyerere's Ujamaa Ideology," 12.
- Ndossi, Neema. 2017. "REPUTATION RISKS: CAUSES, EFFECTS AND STRATEGIES TO OVERCOME REPUTATION RISKS: A CASE STUDY OF ACACIA MINING," 104.
- Olingo, Allan. 2020. "Tanzania slaps Acacia Mining with \$190b tax bill." *The East African*. July 28, 2020. <https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/tanzania-slaps-acacia-mining-with-190b-tax-bill-1370176>.

- Pedersen, Rasmus Hundsbæk, Willison Mutagwaba, Jesper Bosse Jønsson, George Schoneveld, Thabit Jacob, Maisory Chacha, Xiaoxue Weng, and Maria G. Njau. 2019. "Mining-Sector Dynamics in an Era of Resurgent Resource Nationalism: Changing Relations between Large-Scale Mining and Artisanal and Small-Scale Mining in Tanzania." *Resources Policy* 62 (August): 339–46. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.04.009>.
- Plakhov, Demyan, and Faizaan Jaffer. 2018. "Canadian Mining Companies Operating in Tanzania." 2018. http://democracylab.uwo.ca//Archives/2017_2018_research/mining_in_tanzania/canadian_mining_companies_operating_in_tanzania.html.
- Poncian, Japhace. 2019. "Galvanising Political Support through Resource Nationalism: A Case of Tanzania's 2017 Extractive Sector Reforms." *Political Geography* 69 (March): 77–88. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.12.013>.
- Poncian, Japhace, and Henry Michael Kigodi. 2018. "Transparency Initiatives and Tanzania's Extractive Industry Governance." *Development Studies Research* 5 (1): 106–21. <https://doi.org/10.1080/21665095.2018.1486219>.
- Reuters. 2017a. "Tanzania tax row knocks Acacia Mining shares," July 25, 2017, sec. Commodities News. <https://www.reuters.com/article/us-acacia-mining-tanzania-stocks-idUSKBN1AA2B0>.
- . 2017b. "Acacia Mining scales down as Tanzanian export ban bites," September 4, 2017, sec. Commodities News. <https://www.reuters.com/article/us-acacia-mining-outlook-idUSKCN1BF1CB>.
- . 2018. "UPDATE 2-Tanzania Charges Acacia Subsidiaries with Tax Evasion, Corruption," October 17, 2018, sec. Breaking City News. <https://www.reuters.com/article/acacia-mining-tanzania-corruption-idUKL8N1WX61U>.
- . 2019. "Barrick Gold reaches deal with Tanzania to settle disputes over Acacia Mining," October 20, 2019, sec. Mining & Metals - Specialty. <https://www.reuters.com/article/barrick-gold-tanzania-idUSL3N2750BB>.
- Roder, Kai. 2019. "'Bulldozer Politics', State-Making and (Neo-)Extractive Industries in Tanzania's Gold Mining Sector." *The Extractive Industries and Society* 6 (2): 407–12. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.10.012>.
- Shiyo, Janeth. 2017. "Tax justice in Tanzania: Magufuli investigating contracts with Acacia Mining." Fingo. June 26, 2017. <https://fingo.fi/ajankohtaista/artikkelit/tax-justice-in-tanzania-magufuli-investigating-contracts-with-acacia-mining/>.
- Sipemba, Thomas Mihayo, and Jacqueline Matiko. 2021. "The Mining Law Review - The Law Reviews." 2021. <https://thelawreviews.co.uk/title/the-mining-law-review/tanzania-mining-law>.
- Sloane, Simon. 2020. "Reserve Judgment: Arbitrating Resources Disputes in Africa" 14 (1).
- Solomons, Sascha-Lee. 2018. "Acacia Mining contributes US\$712 million to Tanzania's economy." *Miningreview.com* (blog). July 3, 2018. <https://www.miningreview.com/news/acacia-mining-contributes-us712-million-tanzanias-economy/>.
- "Tanzania - Mining." 2021. 2021. <https://www.trade.gov/country-commercial->

guides/tanzania-mining.

Taylor, Susan. 2017. "Acacia Mining: Tanzania ban costs \$1 mln daily in revenue." *Reuters*, March 24, 2017, sec. Commodities News. <https://www.reuters.com/article/us-acacia-mining-tanzania-idUSKBN16V0SS>.

"TRX Gold Corporation - Buckreef - Buckreef Gold Overview." n.d. Accessed January 30, 2023. <https://www.trxgold.com/buckreef/buckreef-overview/default.aspx>.

"Turning point as Tanzania's gold exports pass \$3 billion mark." 2021. *The Citizen*. May 5, 2021. <https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/business/turning-point-as-tanzania-s-gold-exports-pass-3-billion-mark-3388952>.

Vidal, John. 2013. "Tanzanians Sue African Gold Mining Firms over Deaths in 2011." *The Guardian*, July 31, 2013, sec. Global development. <https://www.theguardian.com/global-development/2013/jul/30/tanzania-african-gold-mining-deaths-barrick>.

"Who Owns and Controls Tanzania's Lucrative Gold Mines?" 2021. *The Citizen*. April 3, 2021. <https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/who-owns-and-controls-tanzania-s-lucrative-gold-mines--2501926>.

